

Katalog BPS : 4102004.32

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2011

<https://jabar.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat

Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2011

Nomor Publikasi : 32520.1201
Katalog BPS : 4102004.32
Jumlah Halaman : 105 halaman

NASKAH:

BPS Provinsi Jawa Barat

GAMBAR KULIT:

BPS Provinsi Jawa Barat

DITERBITKAN OLEH:

BPS Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

JAWA BARAT 2011

Pengarah : Gema Purwana, SE, M.Si
: Dyah Anugrah Kuswardani, MA

Editor : Adang Suteja, SSi.

Penulis : M. Jalaluddin, SST. MSi.
Any Heryani, SST.

Pengolah Data/
Penyiapan Draft : M. Jalaluddin, SST. MSi.
Any Heryani, SST.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat Tahun 2011 telah selesai.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Jawa Barat yang mencakup bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumahtangga dan Sosial Ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, November 2012
BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI JAWA BARAT
Kepala,



Gema Purwana, SE. MSi.
NIP. 195510031977031001

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Konsep Definisi	3
	1.3.1 Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga	3
	1.3.2 Pendidikan	4
	1.3.3 Kesehatan	5
	1.3.4 Fertilitas	5
	1.3.5 Ketenagakerjaan	6
	1.3.6 Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga	8
	1.3.7. Perumahan	9
BAB 2	KEPENDUDUKAN	10
	2.1. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	15
	2.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	16
	2.3. Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	18
BAB 3	PENDIDIKAN	20
	3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	21
	3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	23
	3.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	26
BAB 4	KESEHATAN	30
BAB 5	KETENAGAKERJAAN	35
	5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	35
	5.2. Pengangguran	37
	5.3. Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan, Status Pekerjaan, Jenis Pekerjaan	40
	5.4. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	44
	5.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan Utama	48

BAB 6	PERUMAHAN	53
BAB 7	PENGELUARAN RUMAHTANGGA	61
BAB 8	ASPEK SOSIAL EKONOMI	67
	8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi	
	8.2. Pelayanan Kesehatan, Beras Miskin dan jaminan Sosial	

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011	13
2.2	Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	16
2.3	Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011	17
2.4	Persentase Penduduk 10 Tahun Ketas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	19
3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011	24
4.1	Lama Balita Menyusui, Persentase Penoling Kelahiran Terakhir dan Pemberian Imunisasi menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2011	32
5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut status wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	35
5.2	Jumlah Penduduk yang Menganggur Menurut status wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	38
5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut status wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	39
5.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	41
5.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	43
5.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	45
5.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	46
5.8	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011	50
5.9	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011	51
6.1	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	55
6.2	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	57
7.1	Persentase Penduduk Menurut Golongan Per Kapita Sebulan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	63
7.2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Tipe Daerah dan Jenis Konsumsi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	64
7.3	Distribusi Pengeluaran Per Kapita Sebulan	65
8.1	Persentase Rumah tangga Menurut Penguasaan Telepon Rumah dan <i>Hand Phone</i> (HP) di Jawa Barat Tahun 2011	68

8.2	Persentase Rumahtangga Menurut Penguasaan Komputer di Jawa Barat di Jawa Barat Tahun 2011	69
8.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Penggunaan Internet di Jawa Barat Tahun 2011	71
8.4	Persentase Rumahtangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis Selama 6 Bulan yang lalu dan Jenis Kartu yang Digunakan Provinsi Jawa Barat tahun 2011	72
8.5	Persentase Rumahtangga yang Mendapat/Membeli Beras Miskin Selama 3 Bulan yang lalu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	74
8.6	Persentase Rumahtangga yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan untuk Keperluan Berobat Jalan/Berobat Inap di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	75

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Angka partisipasi Sekolah Menurut Status Wilayah, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	25
3.2	Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	27
3.3	Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	28
5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat tahun 2011	40
5.2	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011	44
5.3	Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011	48
6.1	Persentase Rumahtangga Kumuh di Pulau Jawa Tahun 2010	54
8.1	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Kartu untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	73

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menyokong ibukota negara Indonesia, maka Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang merasakan langsung dari dampak positif maupun dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta. Dampak positif yang terasa adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan raya (tol) yang sudah dilaksanakan dari DKI sampai ke Bandung. Sehingga hal ini memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Namun selain dampak positif, dampak negatif yang terasa semakin bertambah orang yang tergiur dengan gemerlapnya ibukota, maka semakin banyak permasalahan di DKI dirasakan juga oleh masyarakat Provinsi Jawa Barat, diantaranya banjir, sampah yang melimpah, serta kejahatan yang ditimbulkan oleh kemiskinan masyarakat kota.

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Hasil pembangunan tidak akan terlihat apabila tidak ada yang terus menerus memantaunya. Pemantauan pembangunan bisa dilakukan dengan cara melihat data.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data BPS yang dilakukan rutin setiap tahun. Data ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat secara luas. Pemanfaatan data oleh pemerintah mulai dari merumuskan masalah

perencanaan, pemantauan atau evaluasi kekurangan serta keberhasilan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan. Sedangkan pemanfaatan oleh masyarakat diantaranya oleh para ilmuwan atau para kalangan pendidikan dalam melakukan studi ilmiah atau sebagai data pendukungnya. Karena data Sosial Ekonomi ini merupakan data yang selalu dinanti oleh pemerintah dan masyarakat, maka BPS berusaha untuk menyediakannya dengan mutu, kelengkapan dan ketepatan waktu yang makin baik.

Series data ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Data Sosial Ekonomi merupakan data-data yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2011 adalah:

- a. Tersedianya data pokok tentang kesejahteraan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.

- b. Tersedianya data tentang kesejahteraan rumah tangga, sosial budaya, pendidikan, dan data kependudukan yang dirinci berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ketenagakerjaan, fertilitas, pemakaian kontrasepsi, tingkat kematian bayi, pola konsumsi penduduk, kecukupan konsumsi gizi, dan distribusi pengeluaran.

1.3 Konsep dan Definisi

1.3.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus.

- 1) **Rumahtangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumahtangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota

rumahtanega yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumahtangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumahtangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumahtangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga.

Kepala rumahtangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumahtangga tersebut.

1.3.2. Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang, pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang., pendidikan yang pernah

diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7 – 12, 13 – 15, 16 – 18, dan 19 – 24) yang masih duduk di bangku sekolah.

1.3.3. Kesehatan

Sakit adalah menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.3.4. Fertilitas

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya

beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernapas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

1.3.5. Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “**tindakannya nyata**”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/ sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi

tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu : berusaha sendiri, berusaha dibantu butuh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.

1.3.6. Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah-tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan

selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

1.3.7. Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

BAB 2

KEPENDUDUKAN

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia.

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 43.053.732 orang. Penduduk laki-laki sebesar 21.907.040 orang (50,88 persen) dan penduduk perempuan sebesar 21.146.692 orang (49,12 persen). *Sex ratio* tahun 2010 sebesar 103,6. Angka ini menunjukkan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Maksudnya adalah untuk setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.036 laki-laki.

Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya fertilitas, mortalitas dan migrasi. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi, kecukupan kalori, dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang memerlukan

pendidikan. Selanjutnya anak tersebut akan masuk angkatan kerja dan menuntut pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan perempuan usia subur yang akan menikah dan melahirkan bayi.

Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang besar di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan bayi-bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi. Lima belas tahun kemudian bayi-bayi ini akan membentuk kelompok perempuan usia subur. Meskipun tingkat fertilitas sudah menurun, apabila jumlah ibunya besar, sebagai akibat tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu serta adanya perbaikan kesehatan, maka jumlah bayi yang lahir masih tetap banyak. Pengetahuan tentang fertilitas atau kelahiran dan KB serta indikator-indikatornya sangat berguna bagi para penentu kebijakan dan perencana program untuk merencanakan pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan anak.

Peningkatan jumlah penduduk harus diantisipasi dan ditangani dengan baik oleh OPD terkait dan dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Adanya dua instansi yang menangani KB di Jawa Barat yakni BKKBN dan BPPKB diharapkan bisa saling mengisi dan berbagi peran dalam upaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus diupayakan agar pendidikan wanita semakin

tinggi. Dengan meningkatnya pengetahuan wanita diharapkan sosialisasi pengetahuan akan kesehatan reproduksi semakin mudah dipahami. Harapannya umur kawin pertama penduduk pada perempuan dapat dinaikkan. Dengan meningkatnya usia perkawinan maka umur reproduksinya bisa semakin pendek. Kondisi ini bisa memberi andil berkurangnya kesempatan memperoleh banyak anak sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat kelahiran.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 4,86 juta jiwa atau 11,08 persen penduduk Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Kabupaten/Kota lainnya dengan jumlah penduduk tertinggi di bawah Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Bandung (3,24 juta jiwa atau 7,38 persen), Kabupaten Bekasi (2,68 juta jiwa atau 6,11 persen), Kabupaten Garut (2,45 juta jiwa atau 5,58 persen), dan Kota Bandung (2,44 juta jiwa atau 5,56 persen). Sementara itu 3 (tiga) wilayah yang mempunyai penduduk paling sedikit adalah Kota Banjar (178.302 jiwa atau 0,41 persen), Kota Cirebon (301.711 jiwa atau 0,69 persen) dan Kota Sukabumi (304.044 jiwa atau 0,69 persen).

Kalau melihat tabel 2.1. Kepadatan penduduk di Jawa Barat per Km^2 adalah 1.235 penduduk per Km^2 , sedangkan tingkat kabupaten/kota yang terpadat adalah Kota Bandung, yaitu 14.491 penduduk per Km^2 menyusul di tempat kedua adalah Kota Cimahi yaitu 13.371 penduduk per Km^2 , sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kabupaten Sukabumi yaitu 573 penduduk per Km^2 .

Tabel. 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²	Persentase Total Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	4.857.612	2.997,13	1.621	11,08
2	Kab. Sukabumi	2.383.450	4.160,75	573	5,44
3	Kab. Cianjur	2.210.267	3.594,65	615	5,04
4	Kab. Bandung	3.235.615	1.756,65	1.842	7,38
5	Kab. Garut	2.447.287	3.094,40	791	5,58
6	Kab. Tasikmalaya	1.705.763	2.702,85	631	3,89
7	Kab. Ciamis	1.560.021	2.740,76	569	3,56
8	Kab. Kuningan	1.054.183	1.189,60	886	2,41
9	Kab. Cirebon	2.104.313	1.071,05	1.965	4,80
10	Kab. Majalengka	1.187.417	1.343,93	884	2,71
11	Kab. Sumedang	1.113.238	1.560,49	713	2,54
12	Kab. Indramayu	1.693.610	2.092,10	810	3,86
13	Kab. Subang	1.491.464	2.164,48	689	3,40
14	Kab. Purwakarta	867.828	989,89	877	1,98
15	Kab. Karawang	2.165.996	1.914,16	1.132	4,94
16	Kab. Bekasi	2.677.631	1.269,51	2.109	6,11
17	Kab. Bandung Barat	1.537.402	1.278,17	1.203	3,51
18	Kota Bogor	967.398	111,73	8.658	2,21
19	Kota Sukabumi	304.044	48,96	6.210	0,69
20	Kota Bandung	2.437.874	168,23	14.491	5,56
21	Kota Cirebon	301.711	40,16	7.513	0,69
22	Kota Bekasi	2.376.794	213,58	11.128	5,42
23	Kota Depok	1.769.787	199,44	8.874	4,04
24	Kota Cimahi	550.894	41,2	13.371	1,26
25	Kota Tasikmalaya	646.874	184,38	3.508	1,48
26	Kota Banjar	178.302	130,86	1.363	0,41
	Jawa Barat	43.826.775	37.116,54	1.235	100,00

Sumber : Susenas 2011

Kebijakan kependudukan yang menitikberatkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk masih perlu dilanjutkan. Fokus utama mengacu pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang tepat akan berdampak positif dalam mengurangi berbagai kendala sosial dan beban masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan penduduk adalah fokus yang diharapkan dari kegiatan pembangunan di Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, penduduk diberi kesempatan dan kemudahan untuk dapat memperoleh pekerjaan, bekerja melakukan aktivitas ekonomi, dapat kemudahan untuk berusaha, dan dapat memperoleh penghasilan. Idealnya akses informasi, akses kesehatan, dan akses pendidikan dapat dinikmati dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Data tentang kependudukan menjadi hal yang sangat penting mengingat obyek pembangunan itu sendiri adalah penduduk.

Peningkatan sumber daya manusia menuju manusia Jawa Barat yang mandiri dan berkualitas menjadi target utama pembangunan. Selain menjadi target tentu saja dengan tersedianya manusia yang berkualitas, bermoral, dan mau berpikir untuk kemajuan Jawa Barat, maka proses perencanaan program pembangunan dan implementasinya harus yang bersifat lebih mudah dijalankan dan direalisasikan.

2.1. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur digunakan untuk mengetahui berbagai indikator, terutama indikator kependudukan. Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan sasaran dan penerima manfaat kebijakan dari program yang akan digulirkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi swasta jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dipergunakan untuk mengetahui segmentasi pasar.

Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, dan lain-lain.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Jawa Barat tahun 2011 mencapai sebesar 51,53. Artinya bahwa pada tahun 2011, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif.

Diantara penduduk yang usianya di bawah 15 tahun ada sebagian penduduk yang terpaksa bekerja membantu ekonomi orang tuanya, dan sebagian penduduk usia di atas 65 tahun masih aktif melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu indikator angka ketergantungan bukan merupakan indikator yang sensitif. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung

diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	2.123.186	2.011.179	4.134.365
5-9	2.291.229	2.139.434	4.430.663
10-14	2.287.278	2.130.566	4.417.844
15-19	1.985.681	1.775.737	3.761.418
20-24	1.768.574	1.789.947	3.558.521
25-29	2.008.046	2.109.588	4.117.634
30-34	1.830.142	1.733.138	3.563.280
35-39	1.858.464	1.801.034	3.659.498
40-44	1.522.271	1.419.526	2.941.797
45-49	1.272.055	1.334.062	2.606.117
50-54	1.061.757	1.014.256	2.076.013
55-59	777.460	693.832	1.471.292
60-64	605.548	561.555	1.167.103
65+	908.697	1.012.533	1.921.230
Jumlah	22.300.388	21.526.387	43.826.775

Sumber: Susenas 2011

2.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Jawa Barat hasil Susenas 2011 berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011**

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	2.496.599	2.361.013	4.857.612	105,74
2	Kab. Sukabumi	1.214.769	1.168.681	2.383.450	103,94
3	Kab. Cianjur	1.143.256	1.067.011	2.210.267	107,15
4	Kab. Bandung	1.649.367	1.586.248	3.235.615	103,98
5	Kab. Garut	1.239.633	1.207.654	2.447.287	102,65
6	Kab. Tasikmalaya	849.989	855.774	1.705.763	99,32
7	Kab. Ciamis	772.515	787.506	1.560.021	98,10
8	Kab. Kuningan	529.980	524.203	1.054.183	101,10
9	Kab. Cirebon	1.078.486	1.025.827	2.104.313	105,13
10	Kab. Majalengka	593.358	594.059	1.187.417	99,88
11	Kab. Sumedang	557.633	555.605	1.113.238	100,37
12	Kab. Indramayu	872.021	821.589	1.693.610	106,14
13	Kab. Subang	753.211	738.253	1.491.464	102,03
14	Kab. Purwakarta	443.912	423.916	867.828	104,72
15	Kab. Karawang	1.116.587	1.049.409	2.165.996	106,40
16	Kab. Bekasi	1.371.413	1.306.218	2.677.631	104,99
17	Kab. Bandung Barat	784.540	752.862	1.537.402	104,21
18	Kota Bogor	493.496	473.902	967.398	104,13
19	Kota Sukabumi	154.811	149.233	304.044	103,74
20	Kota Bandung	1.237.170	1.200.704	2.437.874	103,04
21	Kota Cirebon	151.268	150.443	301.711	100,55
22	Kota Bekasi	1.204.871	1.171.923	2.376.794	102,81
23	Kota Depok	896.631	873.156	1.769.787	102,69
24	Kota Cimahi	279.046	271.848	550.894	102,65
25	Kota Tasikmalaya	327.232	319.642	646.874	102,37
26	Kota Banjar	88.594	89.708	178.302	98,76
	Jawa Barat	22.300.388	21.526.387	43.826.775	103,60

Sumber : Susenas 2011

Rasio jenis kelamin Jawa Barat berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 sebesar 103,6 artinya komposisi laki-laki lebih banyak dibandingkan komposisi perempuan, dengan pengertian ada 103 hingga 104 orang laki-laki di antara 100 orang perempuan.

Melihat tabel 2.3. diatas, rasio jenis kelamin tiga tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Cianjur (107,15), Kabupaten Karawang (106,40) dan Kabupaten Indramayu (106,14), sedangkan rasio jenis kelamin tiga terendah berada di Kabupaten Ciamis (98,10), Kota Banjar (98,76) dan Kabupaten Tasikmalaya (99,32).

2.3. Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan hasil Susenas 2011, persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang belum kawin sebanyak 27,11 persen dan yang pernah kawin sebanyak 72,89 persen.

Dari perempuan yang pernah kawin sebesar 11,52 persen di antara mereka melakukan perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 3,01 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 8,51 persen. Penyebab perceraian bisa disebabkan adanya kesulitan ekonomi, maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik dan mental akibat perkawinan berlangsung saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Total
Belum Kawin	36,98	27,11	32,12
Kawin	60,08	61,37	60,71
Cerai Hidup	1,38	3,01	2,18
Cerai Mati	1,56	8,51	4,99
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2011

<https://jabar.bps.go.id>

BAB 3

PENDIDIKAN

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Jawa Barat terus berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dikuatkan lagi dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Agar sumber daya manusia meningkat, perlu penanganan yang serius dari unsur pendidikan dan para perencana pembangunan bidang pendidikan. Aspek peningkatan kualitas pendidik, aspek sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, aspek pemerataan, dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan.

SDM yang berkualitas siap bersaing di pasar kerja dan berpeluang besar untuk memperoleh pekerjaan. SDM yang tangguh yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan bahkan berpeluang untuk mengkreasi lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja lain. Pada gilirannya penduduk dapat memperoleh penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memudahkan pendidikan diakses oleh masyarakat, lebih dekat ke masyarakat memerlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang rusak atau membahayakan bisa segera direnovasi. Sarana dan prasarana yang belum ada dan mendesak untuk diadakan, untuk mendekatkan pendidikan pada masyarakat, bisa segera diadakan. Cita-cita luhurnya adalah setiap masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang murah dan berkualitas yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Setiap program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu didukung, perlu diawasi agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diinginkan. Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemajuan rakyat.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, jika tidak diimbangi dengan peningkatan mutu dan kualitas SDM yang ada kita tidak akan dapat menyerap semua perkembangan dari ilmu

pengetahuan tersebut secara maksimal. Di sinilah pendidikan memainkan peran pentingnya dalam rangka berusaha untuk tetap sejajar dan sealur mengimbangi gerak cepat laju ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang salah satunya melalui kemampuan baca tulis. Indikator yang mengukur kemampuan baca tulis adalah Angka Melek melek huruf atau AMH.

Kemampuan membaca dan menulis membantu mudahnya berkomunikasi. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, penduduk lebih mudah menyerap maupun menyampaikan informasi. Ketidakmampuan membaca dan menulis menghambat masuknya pengetahuan. Hal ini berdampak pada keterbelakangan dan ujungnya adalah kemiskinan. Dari kemiskinan mengakibatkan kelompok masyarakat ini sulit mengakses pendidikan. Ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Angka Melek Huruf menurut MDGs adalah Angka Melek Huruf menurut penduduk usia 15-24 tahun. Angka melek huruf didefinisikan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan akumulasi pencapaian pendidikan dasar dan program keaksaraan nasional. Melek huruf menggambarkan suatu potensi untuk pertumbuhan intelektual lebih lanjut dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat.

Tabel . 3.1. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Status Wilayah di Jawa Barat, Tahun 2011

Tipe Daerah	Laki-laki	Perempuan	Total
Perkotaan	99,41	99,62	99,51
Perdesaan	99,57	99,53	99,55
Total	99,46	99,59	99,52

Sumber: BPS, Susenas 2011

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf di Jawa Barat mencapai sekitar 99,52 persen pada tahun 2011, AMH Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai 100 persen. Maka dari data tersebut diatas, pemerintah harus menggali, mengapa penduduk usia 15-24 tahun sebesar 0,48 persen masih ada yang belum bisa membaca dan menulis. Dari tahun ke tahun upaya penurunan kelompok yang buta huruf senantiasa diupayakan.

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA.

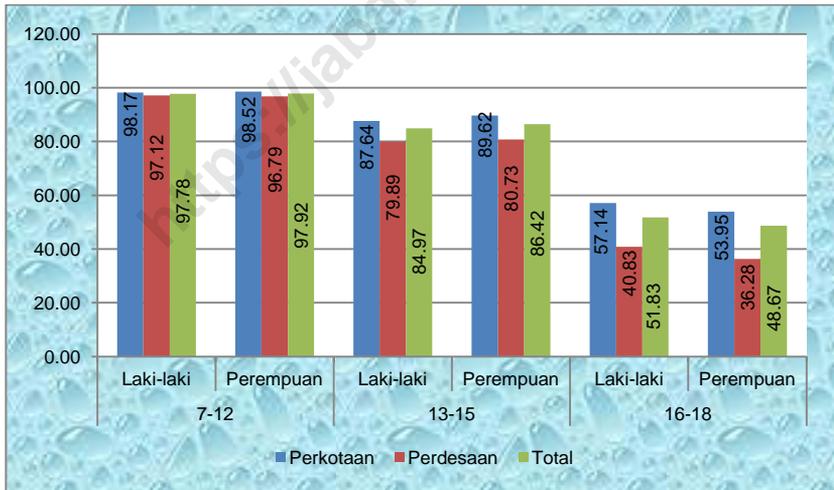
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun sejalan dengan naiknya jenjang pendidikan. APS untuk jenjang SLTP lebih rendah dibanding pada jenjang SD, dan semakin rendah pada jenjang pendidikan lanjutan. Berarti ada sebagian lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, sebagian lulusan SLTP tidak mendaftar ke SLTA.

APS penduduk laki-laki usia 7 – 12 tahun hasil Susenas 2011 sebesar 97,78 persen, sedangkan APS penduduk perempuan usia 7 – 12 tahun sebesar 97,92 persen. Artinya pada Tahun 2011 dari seluruh penduduk laki-laki usia 7 – 12 tahun, yang masih bersekolah sebesar 97,78 persen, sedangkan sebesar 2,22 persen ada yang tidak/belum bersekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi. Demikian juga untuk penduduk perempuan usia 7 – 12 tahun yang bersekolah ada sebesar 97,92 persen, dan sebesar 2,08 persen

anak-anak perempuan di usia tersebut tidak/belum bersekolah ditambah dengan yang sudah tidak bersekolah lagi.

APS laki-laki usia kelompok umur 7-12 tahun (97,78 persen) dan 13-15 tahun (84,97 persen) lebih kecil jika dibandingkan APS perempuan pada kelompok umur yang sama secara berturut-turut 7-12 tahun (97,92 persen) dan 13-15 tahun (86,42 persen). Melihat angka tersebut cukup menggembirakan karena fenomena kalau anak perempuan cukup sampai Sekolah Dasar telah beralih ke Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan APS pada kelompok umur 16-18 tahun masih didominasi anak laki-laki (51,83 persen),

Gambar 3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Status Wilayah, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Jawa Barat, Tahun 2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2011

Dari Gambar 3.2. menunjukkan bahwa APS masih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan, baik APS pada kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun maupun 16-18 tahun. Dan hal ini terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan.

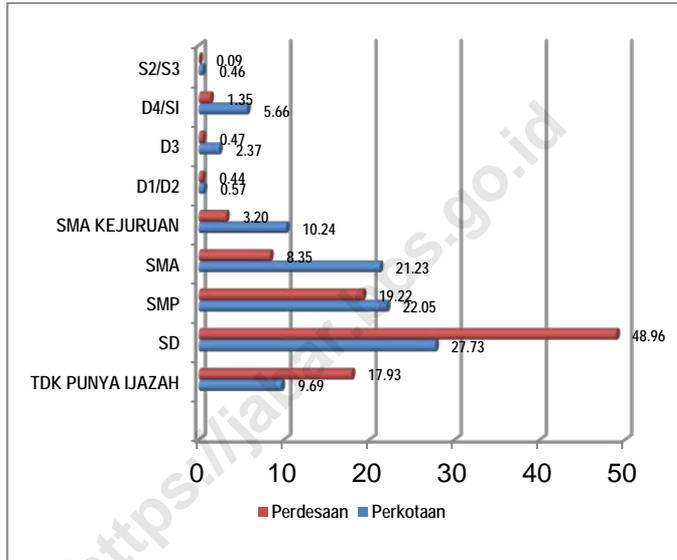
3.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Selain data pendidikan di atas, data pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula. Selain ingin memperoleh data kualitas sumber daya manusia, pemerintah ingin mengetahui berapa besar penduduk yang telah mengenyam pendidikan khususnya pada tingkat dasar sembilan tahun.

Pada gambar 3.3 terlihat bahwa penduduk laki-laki berpendidikan tertinggi yang ditamatkan pada jenjang SD di daerah perkotaan sebesar 27,73 persen di daerah perdesaan sebesar 48,96 persen. Di gambar yang sama diperoleh data, ada sebesar 22,89 persen penduduk laki-laki di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan sebesar 19,07 persen yang berpendidikan tertingginya SMP. Pada menyelesaikan jenjang SMU/SMK ada sebesar 28,30 persen penduduk laki-laki di perkotaan dan sebesar 9,53 persen di perdesaan. Selanjutnya 8,61 penduduk laki-laki berpendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang D1 (diploma 1) sampai dengan S3 di daerah perkotaan sebesar 8,61 persen, sedangkan di daerah

perdesaan ada sebanyak 2,13 persen yang berpendidikan dari D1 – S3.

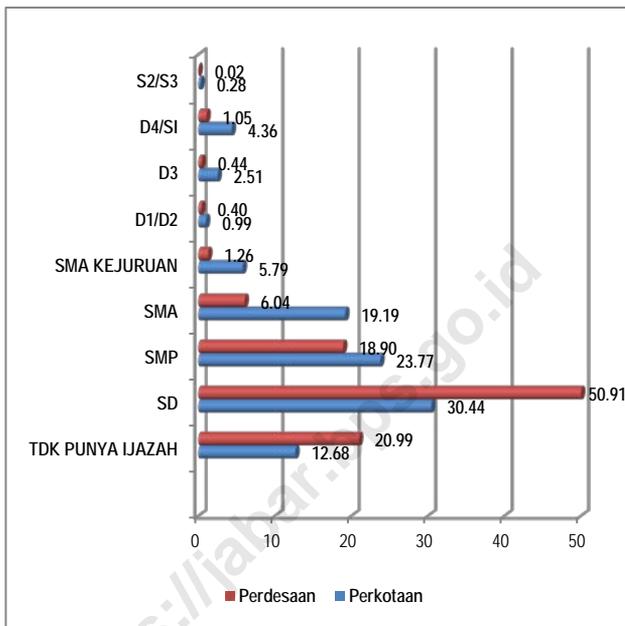
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Jawa Barat, Tahun 2011



Sumber: BPS, Susenas 2011

Gambar 3.3. di bawah ini merupakan perbandingan antara gambar 3.2. diatas, dimana pada gambar 3.4 di bawah ini merupakan persentase penduduk perempuan 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Jawa Barat, Tahun 2011



Sumber: BPS, Susenas 2011

Kalau kita bandingkan gambar 3.3. dan gambar 3.4. dapat disimpulkan bahwa persentase pendidikan penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang tinggi persentasenya masih jenjang SMP ke bawah, sedangkan jenjang SMU/SMK ke atas persentasenya masih rendah.

Hampir setengah penduduk Provinsi Jawa Barat masih berpendidikan SD. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat harus

terus membuat terobosan program dan kebijakan yang bisa meningkatkan angka-angka tersebut diatas. Bantuan Operasional Sekolah, program BOS buku, Program Khusus Bantuan Murid (BKM), program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), program bea siswa, program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, serta realisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan perlu terus dijaga kesinambungannya. Pendidikan jangan sampai menjadi barang yang mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB 4

KESEHATAN

Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. AKB merupakan indikator sensitif yang berkaitan dengan ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan anak. Terkait pula dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan ibu, dan kecukupan gizi. Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bidan di Desa (BDD), dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, tenaga medis lain) dianggap lebih baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh dukun, famili/lainnya.

Secara umum persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan pada tahun 2011. Sebaliknya persentase penolong kelahiran oleh dukun dan tenaga lainnya di luar tenaga medis mengalami penurunan. Kondisi ini sangat menggembirakan. Perlu terus

disosialisasikan pentingnya melahirkan di tempat pelayanan kesehatan agar kesadaran ibu hamil mau melahirkan di fasilitas kesehatan dengan penolong kelahiran dokter atau bidan/tenaga medis lain meningkat. Perlu didukung juga dengan ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan, sarana, dan prasarana kesehatan.

Penanganan proses persalinan sampai dengan pasca persalinan yang berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian bayi dan ibu. Dukun yang membantu proses persalinan tidak dikategorikan dalam tenaga kesehatan lain walaupun pelatihan bagi dukun beranak juga digalakkan oleh OPD terkait. Persentase penolong kelahiran balita oleh dokter mengalami penurunan dari 15,24 persen pada tahun 2010 menjadi 13,90 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, penolong kelahiran oleh bidan/tenaga mengalami kenaikan, dari 57,39 persen di tahun 2010 menjadi 61,11 persen di tahun 2011. Persalinan oleh dukun menurun dari 27,15 persen menjadi 24,81 persen pada tahun 2011.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam waktu yang cukup pada balita dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit lainnya mengingat ASI merupakan mikronutrein penting bagi balita. ASI juga merupakan salah satu faktor penting untuk perkembangan anak dan merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi serta mempercepat perkembangan berat badan. Lamanya balita diberi ASI yang terbaik adalah sampai usia 24 bulan. Sejak lahir sampai usia enam bulan sebaiknya bayi hanya diberi ASI saja. Setelah enam bulan bayi mulai dapat diberikan makanan

tambahan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Setelah usia tersebut balita sudah siap disapih.

Tabel 4.1. Lama Balita Menyusui, Persentase Penolong Kelahiran Terakhir dan Pemberian Imunisasi Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010 dan 2011

Indikator	Tahun	
	2010	2011
A. Balita		
1. % Balita yang Disusui	95,18	95,86
2. % disusui 24+ bulan	33,69	33,12
3. % disusui 12-23 bulan	39,78	41,42
4. % disusui < 12 bulan	26,53	25,46
B. % Penolong Kelahiran (terakhir)		
1. Dokter	15,24	13,90
2. Bidan/Tenaga Medis Lain	57,39	61,11
3. Dukun	27,15	24,81
4. Lainnya	0,22	0,18
C. Imunisasi		
1. Balita yang Diberi Imunisasi	96,55	95,38
2. BCG	93,76	92,51
3. DPT	91,11	90,14
4. Polio	91,99	90,84
5. Campak/Morbili	79,31	77,28
6. Hepatitis B	87,01	84,59

Sumber: Susenas 2010 dan 2011

Persentase balita yang diberi ASI meningkat 0,68 persen menjadi 95,86 persen pada tahun 2011. Namun kalau dilihat persentase balita yang disusui oleh ibunya selama 2 tahun atau lebih persentasenya mengalami sedikit penurunan, sedangkan yang disusui antara 12 bulan sampai dengan 23 bulan mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Untuk yang disusui

kurang dari 12 bulan persentasenya mengalami sedikit penurunan dari 26,53 persen di tahun 2010 menjadi 25,46 persen pada tahun 2011.

Suatu fenomena yang cukup menyedihkan bila balita semakin lama semakin tidak mendapatkan ASI. Apakah para ibu jaman sekarang sudah tidak mau lagi menyusui anak-anaknya. Apakah ibu jaman sekarang lebih repot memberikan ASI-nya dibandingkan dengan memberikan susu formula. Ataukah para ibu jaman sekarang sudah banyak yang bekerja sehingga tidak ada waktu untuk memberikan ASI pada anaknya. Ataukah susu formula jaman sekarang sudah murah harganya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pemerintah, agar pemerintah bisa menggalakkan pemberian ASI bagi bayi, dimana ASI lebih berkualitas, lebih murah, lebih memberikan kekebalan pada anak-anaknya dan lebih efisien dan steril.

Imunisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pencegahan penyakit. Beberapa jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita antara lain adalah BCG, Polio, DPT, dan Campak. Persentase balita mendapat imunisasi tahun 2011 lebih kecil dibanding pada tahun 2010 yaitu dari 96,55 persen pada tahun 2010 turun menjadi 95,38 persen pada tahun 2011. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa terjadi penurunan persentase balita yang mendapat imunisasi untuk semua jenis imunisasi. Hal ini sebagai bahan evaluasi pemerintah di bidang Kesehatan, mengapa ada penurunan balita yang mendapat imunisasi?

Program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin perlu dilanjutkan. Tentu perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar penyediaan dana pemerintah untuk kesehatan masyarakat benar-benar termanfaatkan pada kelompok masyarakat miskin. Keterjangkauan pelayanan kesehatan pada golongan lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat menstimulus meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Perluasan jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dengan disertai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat melaksanakan perilaku hidup sehat. Sudah banyak upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa, dan penyediaan obat dan fasilitas air bersih. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas.

BAB 5 KETENAGAKERJAAN

5.1. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang sudah siap masuk dalam pasar kerja. Untuk melihat besar-kecilnya kontribusi, serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat, Tahun 2010-2011

Daerah	2010			2011		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	81,42	42,38	62,15	81,38	42,36	62,15
Perdesaan	84,42	40,24	62,64	84,69	39,77	62,51
Total	82,84	41,37	62,38	82,51	41,47	62,27

Sumber: Sakernas 2010-2011

Secara umum untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Data Sakernas memperlihatkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di beberapa daerah kabupaten/kota sebagian besar berada pada kisaran 40 persen. Tiga daerah dengan TPAK perempuan kurang dari 40 persen pada tahun 2011 yaitu, kabupaten Garut (39,67 persen), kabupaten Tasikmalaya (39,59 persen), dan kabupaten Majalengka (39,75 persen). Secara total terjadi sedikit penurunan TPAK di Jawa Barat yaitu dari 62,38 persen pada tahun 2010 dan menjadi 62,27 persen pada tahun 2011..

Jumlah angkatan kerja laki-laki dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kisaran lebih dari dua kalinya jumlah angkatan kerja perempuan. Akibatnya TPAK perempuan selalu lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki. Ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pangsa pasar kerja jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga.

5.2. Pengangguran

Terjadinya pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk yang menganggur di Jawa Barat pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Meski mengalami penurunan, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi. Tingginya jumlah pengangguran menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung dalam kesempatan kerja yang ada, sehingga mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, perkembangan keadaan perekonomian secara global juga berpengaruh terhadap masih tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat.

Tabel 5.2. Jumlah Penduduk yang Menganggur Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Daerah	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	710,221	416,386	1,126,607	861.447	420.662	1.282.109
Pedesaan	514,223	310,561	824,784	397.372	222.362	619.734
Total	1,224,444	726,947	1,951,391	1.258.819	643.024	1.901.843

Sumber : Sakernas 2010-2011

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja

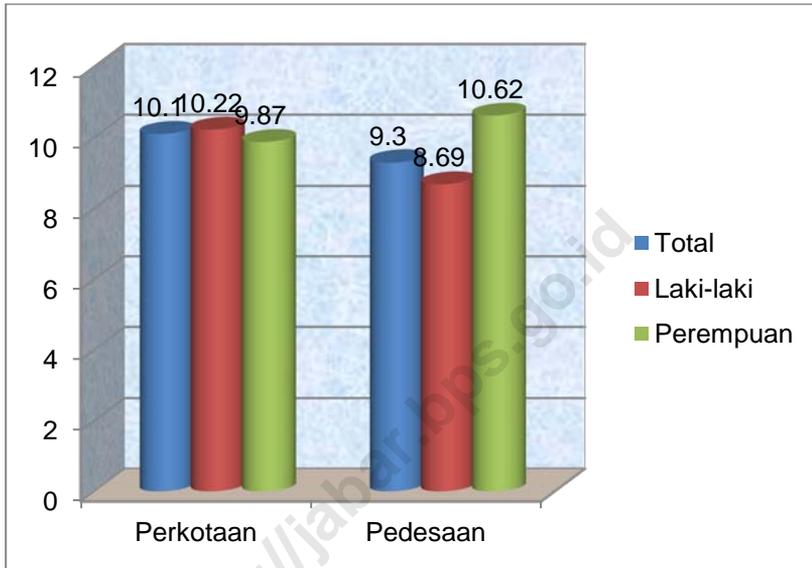
baru. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami penurunan 0.54 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut status wilayah maka tingkat pengangguran daerah perkotaan baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan kemungkinan dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Daerah	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	10.76	12.44	11.33	10,22	9,87	10,10
Pedesaan	8.41	10.96	9.22	8,69	10,62	9,30
Total	9.63	11.76	10.33	9,68	10,11	9,83

Sumber : Sakernas 2010-2011

Gambar 5. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Status Wilayah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2011



Sumber: BPS, Sakernas 2011

5.3. Pekerja Menurut Lapangan Kerja, Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan/usaha merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang

kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan pekerjaan terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa. Analisis yang dilakukan hanya akan memuat lima lapangan usaha terbesar yaitu; pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sementara sisanya akan masuk pada sektor lainnya.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Lapangan Usaha	2010			2011		
	L	P	Total	L	P	Total
Pertanian	23,78	22,59	23,40	21,28	20,60	21,06
Industri	18,10	24,01	20,00	19,15	23,17	20,47
Perdagangan	22,06	30,67	24,83	22,05	34,39	26,09
Jasa Kemasyarakatan	14,08	19,05	15,68	13,77	18,94	15,46
Lainnya	21,97	3,68	16,08	23,75	2,90	15,46
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Sektor perdagangan menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di propinsi Jawa Barat, diikuti oleh sektor pertanian dan industri. Terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yaitu dari 24,83 persen pada tahun 2010 menjadi 26,06 pada tahun 2011. Begitu pula dengan sektor industry yang mengalami kenaikan 0,47 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka sektor industry, perdagangan dan jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki.

Pada tahun 2011 ini sektor pertanian, jasa dan lainnya mengalami penurunan. Keadaan ini disebabkan oleh perpindahan pekerja ke sektor lain yang mengalami penambahan. Sektor jasa kemasyarakatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 2,53 persen di daerah perkotaan dan 0,33 persen di daerah perdesaan.

Sektor dominan di perdesaan adalah sektor pertanian dimana dominasinya sampai 40 persen lebihhal ini lebih disebabkan karena daerah perdesaan masih mengandalkan sektor pertanian sementara daerah perkotaan telah bertransformasi ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Lapangan pekerjaan menurut status wilayah di Jawa Barat pada tahun 2011 selaras dengan teori tersebut. Daerah perkotaan kebalikan dari daerah perdesaan, sektor pertanian menjadi sektor yang paling kecil proporsinya yaitu hanya 10,28 persen. Hampir sama seperti tahun- tahun sebelumnya, sektor yang paling dominan di perkotaan adalah perdagangan 28,97 persen di ikuti dengan sektor industri 24,05 persen dan sektor jasa 18,73 persen.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

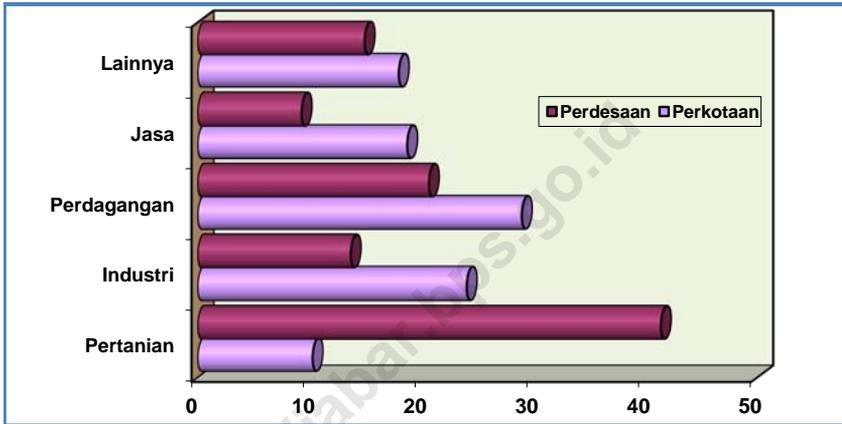
Lapangan Usaha	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Pertanian	7,59	40,56	23,40	10,28	41,40	21,06
Industri	24,05	15,61	20,00	24,05	13,69	20,46
Perdagangan	28,47	20,88	24,83	28,97	20,67	26,09
Jasa Kemasyarakatan	21,26	9,63	15,68	18,73	9,30	15,46
Lainnya	18,62	13,33	16,08	17,98	14,93	16,92
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Sebagian besar wilayah-wilayah kabupaten di Jawa Barat sampai dengan keadaan Agustus 2011, dari lima sektor lapangan pekerjaan ternyata sektor pertanian masih menjadi andalan penyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian diatas 25 persen. Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur adalah dua kabupaten yang tertinggi persentase penduduknya yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40,50 persen. Hal ini dapat dipahami karena dua kabupaten tersebut merupakan sentra pertanian padi dan palawija. Di kabupaten Tasikmalaya sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industry yaitu sebesar 36,81 persen, sedangkan kota Bekasi di sektor jasa

sebesar 32,05 persen dan untuk kota Cirebon sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perdagangan yaitu mencapai 49,27 persen.

Gambar 5.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011



Sumber: Sakernas 2010-2011

5.4. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Berdasarkan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002, Jenis pekerjaan biasanya dibagi menjadi: Tenaga profesional, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, Tata usaha, Tenaga usaha penjualan, Tenaga usaha jasa, Tenaga usaha pertanian, Tenaga produksi, operator, pekerja kasar, dan lainnya. Tiga kategori yang disebut pertama dimasukkan dalam pekerjaan *skilled*, Kategori lain dalam analisis termasuk dalam pekerjaan yang *unskilled*.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenis Pekerjaan	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	5,26	8,83	6,41	5,15	8,39	6,21
2	1,34	0,67	1,12	1,55	0,81	1,31
3	5,33	5,88	5,51	5,13	5,80	5,35
4	19,34	28,64	22,34	19,54	31,48	23,45
5	4,57	8,37	5,79	5,22	9,14	6,50
6	23,49	22,30	23,11	20,81	20,51	20,71
7/8/9	39,93	25,26	35,20	41,99	23,80	36,03
Lainnya	0,75	0,05	0,53	0,63	0,06	0,44
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Keterangan:

1. Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. T U Tani, Kebun, Ternak2, Ikan, Hutan Dan Perburuan
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar
- X/00. Lainnya

Komposisi jenis pekerjaan utama penduduk di propvinsi Jawa Barat pada tahun 2011 ini adalah tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar, ini berarti tenaga kerja di Jawa Barat sebagian besar

masih merupakan pekerja *unskilled* yang artinya untuk memasuki pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian. Namun demikian secara umum pekerjaan yang memerlukan keterampilan (*skilled*) mengalami kenaikan di tahun 2011 dibandingkan dengan 2010. Tenaga profesional mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen, kepemimpinan dan ketatalaksanaan mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen sementara Tata usaha mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen.

Tabel 5.7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Jenis *) Pekerjaan	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	8,74	3,88	6,41	7,65	3,48	6,21
2	1,59	0,61	1,12	1,70	0,57	1,31
3	8,85	1,88	5,51	7,42	1,44	5,35
4	24,49	20,01	22,34	23,38	19,80	23,45
5	8,58	2,77	5,79	8,24	3,22	6,50
6	7,42	40,13	23,11	10,01	40,92	20,71
7/8/9	39,46	30,58	35,20	39,61	30,57	36,47
Total	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Keterangan: *) Lihat ket. Tabel 5.4.

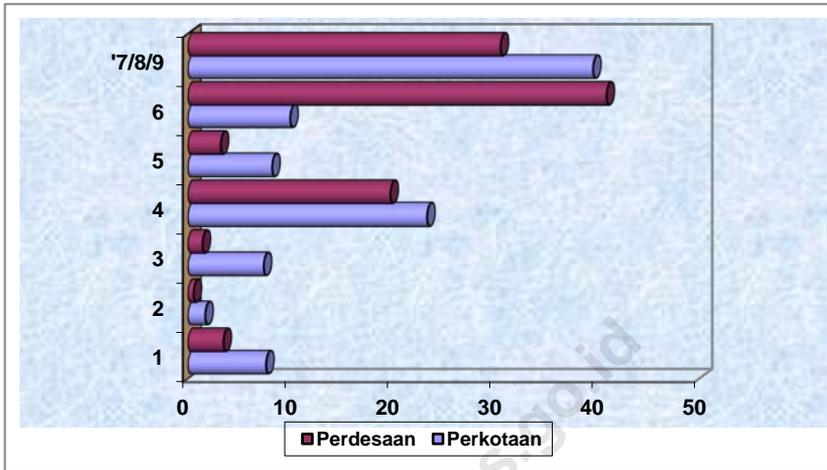
Hal yang cukup menarik adalah Persentase penduduk perempuan pada jenis pekerjaan yang memerlukan keterampilan

lebih tinggi dari pada tenaga kerja laki-laki, terutama untuk sektor tenaga usaha penjualan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dikuasai oleh pekerja laki-laki sebesar 41,99 persen dibanding tenaga kerja perempuan sebesar 23,80 persen.

Secara umum tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menurut jenis pekerjaan didominasi oleh tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar yaitu sebesar 36,47 persen, disusul oleh tenaga usaha penjualan sebesar 23,45 persen, tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan sebesar 20,71 persen terpaut sedikit di urutan ketiga

Sebagian besar daerah kabupaten/kota di Jawa Barat didominasi oleh tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar utamanya untuk kabupaten Bandung dan kota Tasikmalaya yang mencapai 50,48 persen dan 54,03 persen.

Gambar 5.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2011



Sumber: Sakernas 2011

Keterangan *): Lihat ket. Tabel 5.4.

5.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerjaan pada dasarnya terdiri dari empat kategori yang berbeda tentang kelompok penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja yang berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Berusaha sendiri terdiri dari tenaga kerja yang benar-benar berusaha sendiri tanpa dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan pekerja

bebas di non pertanian. Sementara pekerja keluarga juga dikenal sebagai pekerja tak dibayar.

Bila dibandingkan antar waktu, keadaan tahun 2011 sedikit berbeda dengan tahun 2010. Gambaran yang sedikit berbeda itu ditunjukkan oleh status buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2011 yang mengalami kenaikan sebesar 5,74 dari tahun tahun 2010, sedangkan untuk status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan pekerja bebas di non pertanian mengalami penurunan. Kondisi ini mungkin sebagai dampak dari adanya beberapa pengurangan tenaga kerja dari para penduduk yang memiliki usaha sendiri. Hal ini juga di buktikan dengan turunya status pekerja berusaha sendiri dari 23,11 persen menjadi 20,13 persen pada tahun 2011 ini.

Temuan menarik lainnya adalah adanya perbedaan yang cukup nyata antara laki-laki dan perempuan dalam hal status pekerjaan keluarga atau pekerja tidak di bayar. Pekerja perempuan berstatus sebagai pekerja dibayar/karyawan pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar lebih dari 20 persen sedangkan pekerja laki-laki hanya 2,69 persen saja.. Jika melihat fakta tersebut, tampaknya besarnya TPAK perempuan (39,77%) tidak berarti naiknya jumlah atau persentase pekerja perempuan dengan status pekerjaan yang lebih baik. Hal ini, untuk kasus di Indonesia, tidak bisa ditarik garis lurus karena peningkatan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka. Karena banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah).

Tabel 5.8. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Status Pekerjaan	2010			2011		
	L	P	Total	L	P	Total
Berusaha sendiri	25,28	18,52	23,11	21,64	17,02	20,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/burh tidak dibayar	18,26	11,46	16,07	14,29	10,85	13,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,71	1,25	2,92	4,05	1,84	3,33
Buruh/karyawan/pegawai	33,82	35,56	34,38	40,24	39,87	40,12
Pekerja bebas di pertanian	7,95	7,34	7,76	7,49	6,78	7,25
Pekerja bebas di non pertanian	8,29	3,00	6,58	8,97	3,29	7,11
Pekerja keluarga/tak dibayar	2,69	22,87	9,19	3,32	20,35	8,90
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Banyaknya pabrik, pertokoan dan swalayan, perusahaan swasta serta instansi pemerintah mengakibatkan lapangan kerja di daerah perkotaan lebih banyak pekerjaan yang menyerap buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2011 penduduk bekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai di daerah perkotaan persentasenya lebih tinggi (49,08 persen). Naik sebesar 1,42 persen dibanding tahun sebelumnya karena adanya penerimaan PNS dan makin berkembangnya kondisi perekonomian di daerah perkotaan. Karena sebagian besar di daerah pedesaan penduduknya adalah petani maka status pekerjaan di daerah pedesaan lebih banyak pada

status berusaha sendiri 20,86 persen serta buruh/karyawan/pegawai sebesar 23,22 persen.

Tabel 5.9. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Status Wilayah di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Status Pekerjaan	2010			2011		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Berusaha sendiri	23,98	22,16	23,11	19,74	20,86	20,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11,07	21,49	16,07	11,27	16,74	13,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,15	2,66	2,92	3,48	3,03	3,33
Buruh/karyawan/pegawai	47,66	19,97	34,38	49,08	23,22	40,12
Pekerja bebas di pertanian	2,81	13,12	7,76	2,71	15,83	7,25
Pekerja bebas di non pertanian	5,87	7,36	6,58	6,52	8,21	7,11
Pekerja keluarga/tak dibayar	5,47	13,23	9,19	7,20	12,11	8,90
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2010-2011

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase penduduk di daerah perkotaan menurut status pekerjaan rata-rata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hanya penduduk

yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk daerah perdesaan sebaliknya, yaitu rata-rata mengalami kenaikan kecuali penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota, semua daerah kota didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai. Kabupaten yang didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai adalah kabupaten yang memiliki kawasan industri seperti, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, kemudian ada juga yang memiliki industri yang cukup banyak seperti Kabupaten Bandung, sementara Kabupaten Bogor dan Subang karena berdekatan dengan kota besar yaitu Kota Jakarta dan Bandung.

BAB 6

PERUMAHAN

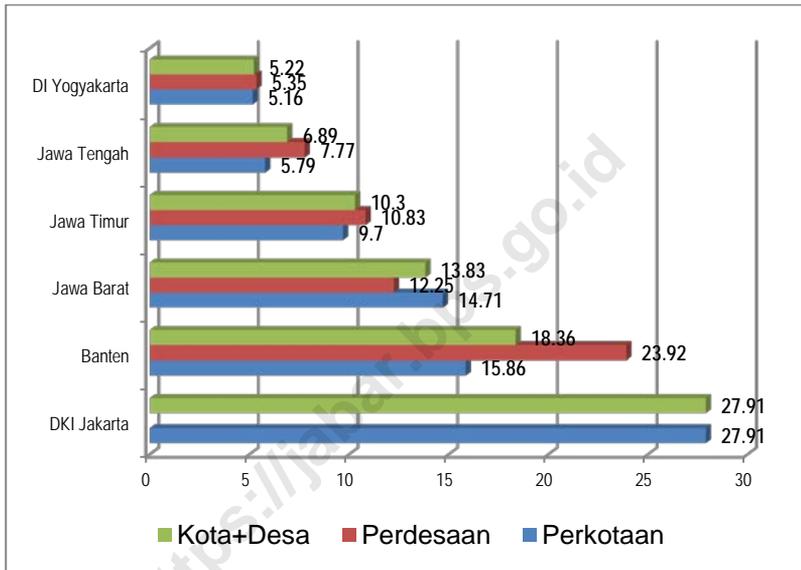
Menurut Azwar (1996) dan Mukono (2000) rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosial. Rumah yang layak huni harus memenuhi standar kesehatan agar penghuni rumah tersebut dapat terjamin kesehatannya. Tersedianya tempat tinggal/rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.

Masalah perumahan tidak akan pernah berakhir selama manusia ada, mulai dari keadaan rumah itu sendiri sampai lingkungan dimana rumah itu berada. Selain permasalahan dari wujud rumahnya, permasalahan lain yaitu ketersediaan lahan, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, serta pemerintah yang belum bisa menyediakan rumah murah sesuai dengan permintaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Pada gambar 6.1. di bawah ini merupakan perbandingan rumahtangga kumuh yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2010. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa rumahtangga kumuh di Provinsi Jawa Barat terdapat pada urutan ketiga (13,83 persen) setelah Provinsi Banten (18,36 persen) dan DKI Jakarta (27,91 persen). Di Jawa Barat sendiri rumahtangga kumuh ini sebesar 14,71

persen berada di daerah perkotaan sedangkan sebesar 12,25 persen berada di daerah perdesaan.

Gambar 6.1. Persentase Rumah tangga Kumuh di Pulau Jawa Tahun 2010



Sumber: BPS, Susenas 2010

Dalam Susenas 2011 dikumpulkan berbagai indikator perumahan, seperti status kepemilikan rumah tinggal, jenis atap, dinding, dan lantai rumah tinggal, luas lantai, dan fasilitas-fasilitas rumah tangga lainnya, seperti sumber air minum, tempat buang air besar, dan lain-lain. Dengan dikumpulkannya data-data diatas diharapkan kondisi dan situasi perumahan di Jawa Barat dapat diketahui dengan baik.

Tabel 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan
Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Rincian Indikator	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Status Kepemilikan Rumah			
Milik sendiri	72,32	88,06	77,94
Kontrak	7,05	0,70	4,78
Sewa	5,51	0,19	3,61
Lainnya	15,12	11,05	13,66
2 Jenis Atap Terluas			
Beton	3,24	1,52	2,63
Genteng	87,26	95,67	90,27
Lainnya	9,50	2,81	7,11
3 Jenis Dinding Terluas			
Tembok	87,86	61,47	78,43
Lainnya	12,14	38,53	21,57
4 Jenis Lantai Terluas			
Bkn tanah/bambu	97,72	93,52	96,22
Tanah/Bambu	2,28	6,48	3,78
5 Luas Lantai Per Kapita			
< =7 m ²	0,48	0,12	0,35
8 - 20 m ²	8,44	4,12	6,90
> =21 m ²	91,07	95,76	92,75

Sumber : Susenas 2010

Tabel 6.1. menggambarkan kondisi perumahan yang dilihat dari 5 indikator perumahan yaitu persentase status kepemilikan rumah, rumah dengan jenis atap terluas, rumah dengan jenis dinding

terluas, jenis lantai terluas dan persentase menurut luas lantai per kapita. Bila dilihat dari tabel tersebut maka secara umum kondisi perumahan di Jawa Barat adalah banyak rumah dengan status milik sendiri (77,94%), atap terluas rumah berjenis genteng (90,27%), dengan dinding terluas berjenis tembok (78,43%), lantai terluasnya bukan tanah (96,22%) dan dengan luas lantai per kapitanya lebih besar dari 21 m² (92,75%).

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan
Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Rincian Indikator	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Sumber air minum			
- Air kemasan bermerk/isi ulang	33,98	11,29	25,87
- Ledeng meteran/eceran	9,87	4,38	7,91
- Sumur bor/pompa	25,33	16,17	22,06
- Sumur/Mata Air Terlindung	25,81	46,96	33,37
- Lainnya	5,01	21,21	10,8
2 Jarak Ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja			
- < 10 m	36,1	42,76	21,13
- >= 10 m	42,76	49,37	45,74
- Tidak tahu	21,13	24,65	22,72
3 Cara memperoleh air minum			
- membeli	44,52	18,5	35,22
- Tidak membeli	55,48	81,5	64,78
4 Fasilitas tempat buang air besar			
- Sendiri	74,56	55,07	67,6
- Bersama	13,97	14,1	14,02
- Umum	4,55	9,73	6,4
- Tidak ada	6,91	21,11	11,98

5	Jenis Kloset			
	- Leher angsa	86,95	66,23	80,31
	- Plengsengan	7,69	12,45	9,21
	- cemplung/cubluk	3,15	9,92	5,32
	- Tidak pakai	2,21	11,4	5,16
6	Tempat pembuangan akhir tinja			
	- Tangki/SPAL	66,04	44,39	58,3
	- Kolam/Sawah	6,85	22,05	12,28
	- Lainnya	27,11	33,56	29,42
7	Sumber penerangan			
	- Listrik PLN	98,71	96,99	98,09
	- Listrik non PLN	1,01	1,97	1,36
	- Lainnya	0,28	1,04	0,55
8	Daya Listrik terpasang (watt)			
	- 450	39,27	57,77	45,81
	- 900 - 2.200	48,07	18,57	37,65
	- > 2.200	0,87	0,08	0,59
	- Tanpa meteran	11,79	23,58	15,96
9	Bahan bakar/energi utama untuk memasak			
	- Listrik	1,7	1,59	1,66
	- Gas elpiji	81,43	45,5	68,59
	- Minyak tanah	2,23	0,7	1,68
	- Kayu bakar	12,57	51,56	26,5
	- Lainnya	2,07	0,65	1,56

Sumber : Susenas 2010

Bila dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan maka untuk rumah dengan status milik sendiri dan atap terluasnya genteng lebih banyak di pedesaan daripada di perkotaan. Sebaliknya untuk rumah dengan dinding terluasnya tembok dan jenis lantai terluas bukan tanah/bambu lebih banyak di perkotaan.

Selanjutnya pada tabel 6.2. diuraikan beberapa indikator perumahan yang berhubungan dengan fasilitas yang terdapat pada rumah tangga menurut tipe daerah di Jawa Barat. Sumber air minum yang banyak digunakan oleh rumah tangga adalah sumur/mata air terlindung (33,37%), air kemasan bermerk/isi ulang (25,87%) dan

sumur bor/pompa (22,06%). Sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat terlihat perbedaannya bila dilihat menurut tipe daerah. Di perkotaan, sumber air minum yang banyak digunakan adalah air kemasan bermerk/isi ulang (33,98%) sedangkan di pedesaan banyak menggunakan sumur/mata air terlindung (46,96%). Hal ini mungkin karena keterbatasan sumber air bersih di perkotaan sehingga untuk air minum menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang, sedangkan air yang berasal dari sumber lainnya hanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja juga sangat berpengaruh pada kesehatan keluarga. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa secara umum rumah tangga dengan jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja sudah lebih dari 10 m² (45,74%). Tetapi terdapat 22,72 persen rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja atau bahkan tidak mengetahui dimana tempat penampungan kotoran/tinja terdekat sehingga tidak bisa memperkirakan jaraknya.

Dalam memperoleh air minum, sebanyak 35,22 persen rumah tangga di Jawa Barat mendapatkannya dengan membeli dan sisanya mendapatkan dengan gratis. Di perkotaan, rumah tangga yang membeli air untuk minum cukup banyak yaitu sebesar 44,52 persen, sedangkan di pedesaan hanya sekitar 18,50 persen.

Untuk fasilitas tempat buang air besar, secara umum rumah tangga di Jawa Barat telah mempunyai fasilitas sendiri (67,60%), dengan jenis kloset yang paling banyak digunakan adalah leher angsa (80,31%), dan tempat pembuangan akhir tinja ke tanki/SPAL

(58,30%). Rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar masih cukup banyak yaitu sekitar 11,98 persen dan rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinjanya ke tempat lainnya (lobang tanah, sungai, pantai, laut, dll) juga masih cukup banyak yaitu 29,42 persen, dengan rincian 27,11 persen rumah tangga di perkotaan dan 33,56 persen rumah tangga di pedesaan. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait untuk membantu menyediakan fasilitas tersebut.

Sumber penerangan yang memadai (listrik) dapat meningkatkan kenyamanan di dalam rumah. Selain itu, anggota rumah tangga juga dapat lebih mengembangkan dirinya, karena dengan adanya sumber penerangan anggota keluarga dapat mendapatkan berbagai informasi melalui televisi, radio bahkan dari internet. Pada tahun 2011, sebanyak 98,09 persen rumah tangga di Jawa Barat telah menikmati listrik, sedangkan sisanya sebanyak 1,91 persen belum menikmati listrik. Dari yang telah menikmati listrik tersebut, 45,81 persennya menggunakan daya sebesar 450 watt, 37,65 persen menggunakan daya 900 – 2.200 watt, 0,59 persen menggunakan daya lebih dari 2.200 watt dan sisanya sebanyak 15,96 persen tidak memakai meteran. Rumah tangga yang tidak memakai meteran ini kemungkinan adalah rumah tangga-rumah tangga yang memakai listrik secara bersama-sama tetapi hanya menggunakan satu meteran atau bisa juga rumah tangga yang mencantol dari tetangganya.

Untuk bahan bakar/energi utama untuk memasak, rumah tangga di Jawa Barat banyak menggunakan gas elpiji. Hal ini dilihat dari tingginya persentase rumah tangga yang menggunakannya yaitu

sebesar 68,59 persen. Tingginya persentase gas elpiji mungkin dikarenakan masyarakat sudah beralih dari menggunakan minyak tanah. Selain lebih awet dalam pemakaian, gas elpiji juga relatif lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Selain itu persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak masih cukup banyak yaitu sekitar 26,50 persen dan yang menggunakan bahan lainnya (arang, briket, dll) sebanyak 1,56 persen. . Bila dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan terlihat bahwa di perkotaan bahan bakar/energi utama yang digunakan untuk memasak adalah gas elpiji (81,43%) sedangkan di pedesaan adalah kayu bakar (45,50%).

Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar untuk memasak dari kayu bakar dan bahan lainnya (bahan bakar padat) merupakan salah satu indikator MDGs yang digunakan dalam menghitung polusi dalam ruangan. Selain polusi yang diakibatkan oleh proses pembakaran kayu tersebut, pemakaian bahan bakar tersebut juga mengurangi sumber daya hutan. Hutan harus tetap dijaga agar tidak punah, karena hutan menyimpan sumber air serta menjaga udara yang dihirup manusia tetap bersih dan sehat.

BAB 7

PENGELUARAN RUMAHTANGGA

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dari besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Namun dalam kenyataannya data pendapatan rumah tangga sangat sulit diperoleh sehingga sering didekati oleh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan.

BPS setiap tahun mengumpulkan data pengeluaran rumah tangga melalui Susenas. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 susenas dilaksanakan sebanyak empat kali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan masing-masing sampel rumah tangga per triwulannya sebesar 5.990 rumah tangga atau 23.960 rumah tangga setahun. Dengan sampel yang cukup besar maka angka pengeluaran untuk konsumsi yang dihasilkan dapat digunakan sampel level kabupaten/kota.

Tabel 7.1. memperlihatkan persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan golongan pengeluaran per kapita sebulan di Jawa Barat tahun 2011. Pada tabel tersebut, modus rata-rata pengeluaran penduduk sebulan adalah pada golongan pengeluaran antara Rp 300.000,- - Rp 499.999,- dengan persentase sebesar 32,43 persen. Bila dibandingkan antara modus rata-rata pengeluaran

provinsi dengan modus rata-rata pengeluaran kabupaten/kota terlihat beberapa perbedaan. Kota Bandung, kota Bekasi dan kota Depok memiliki modus rata-rata pengeluaran di atas provinsi yaitu antara Rp 500.000,- - Rp 749.999,- (kota Bekasi) dan Rp 750.000,- - Rp 999.999,- (kota Bandung dan kota Depok). Sementara itu kabupaten Cianjur, kabupaten Garut, dan kabupaten Tasikmalaya modus rata-rata pengeluarannya berada di bawah provinsi yaitu terletak antara Rp 200.000,- - Rp 299.999,-.

Rata-rata pengeluaran menurut tipe daerah (tabel 7.2.) menunjukkan di daerah perkotaan lebih besar daripada pedesaan yaitu masing-masing sebesar Rp 677.950,- berbanding Rp 415.646,-. Sementara itu rata-rata pengeluaran per kapita untuk Jawa Barat sebesar Rp 587.950,- dengan rincian Rp 292.808,- atau sekitar 49,80 persen untuk konsumsi makanan dan Rp 295.142,- atau 50,20 persen untuk konsumsi bukan makanan. Bila dibandingkan menurut tipe daerah maka terlihat di daerah pedesaan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih tinggi daripada konsumsi bukan makanan sedangkan di daerah perkotaan terjadi sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan.

Tabel 7.1.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Per Kapita Sebulan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Kabupaten/Kota	golongan pengeluaran perkapita								Total
	< 100.000	100.000 - 149.999	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1 Juta +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab Bogor	0,00	1,82	6,27	20,21	32,42	19,83	8,33	11,12	100
Kab Sukabumi	0,00	2,94	8,21	31,01	35,43	14,42	4,97	3,04	100
Kab Cianjur	0,24	5,14	14,36	34,40	32,02	9,08	2,50	2,25	100
Kab Bandung	0,34	0,88	4,52	20,03	35,60	19,52	9,63	9,49	100
Kab Garut	0,09	3,54	13,16	39,23	28,42	10,17	3,33	2,07	100
Kab Tasikmalaya	0,13	2,89	15,99	35,15	28,85	10,51	2,85	3,63	100
Kab Ciamis	0,00	0,20	3,86	22,47	40,40	21,58	6,33	5,16	100
Kab Kuningan	0,00	0,53	5,19	24,49	39,19	18,83	7,18	4,58	100
Kab Cirebon	0,00	0,49	3,63	28,13	42,52	16,36	5,47	3,40	100
Kab Majalengka	0,00	0,59	5,57	22,39	38,89	18,43	7,99	6,15	100
Kab Sumedang	0,00	1,74	5,17	21,70	35,29	21,59	7,11	7,39	100
Kab Indramayu	0,00	0,21	3,47	20,97	40,16	20,60	9,65	4,94	100
Kab Subang	0,00	0,00	3,68	20,88	41,60	22,70	6,41	4,73	100
Kab Purwakarta	0,00	0,45	3,34	15,84	34,51	25,63	9,97	10,26	100
Kab Karawang	0,00	0,00	2,34	15,28	33,99	27,17	11,81	9,41	100
Kab Bekasi	0,00	0,11	0,84	8,02	29,05	26,30	15,85	19,83	100
Kab Bandung Barat	0,21	3,29	13,14	32,50	35,85	9,53	3,89	1,58	100
Kota Bogor	0,00	0,00	0,22	10,08	33,35	25,48	12,18	18,69	100
Kota Sukabumi	0,00	0,00	3,46	15,47	33,37	22,91	10,90	13,90	100
Kota Bandung	0,00	0,20	0,81	7,46	20,58	21,81	13,48	35,65	100
Kota Cirebon	0,00	0,53	1,76	13,15	29,79	24,82	12,05	17,89	100
Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	3,05	21,86	27,77	20,49	26,83	100
Kota Depok	0,00	0,00	0,57	2,12	18,95	26,35	19,45	32,56	100
Kota Cimahi	0,00	0,00	0,93	8,55	24,69	24,13	17,56	24,13	100
Kota Tasikmalaya	0,00	1,92	4,46	25,88	33,52	17,76	5,97	10,50	100
Kota Banjar	0,00	0,42	5,29	24,95	37,59	16,40	7,23	8,11	100
Jawa Barat	0,06	1,28	5,44	20,49	32,43	19,58	9,27	11,44	100

Sumber : Susenas 2011

Tabel 7.2.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Tipe Daerah dan
Jenis Konsumsi di Jawa Barat Tahun 2011

Tipe Daerah	Konsumsi makanan		konsumsi non makanan		Total
(1)	(2)		(3)		(4)
Perkotaan	315.567	(46,55)	362.383	(53,45)	677.950
Pedesaan	249.236	(59,96)	166.410	(40,04)	415.646
Total	292.808	(49,80)	295.142	(50,20)	587.950

Sumber : Susenas 2011

Untuk lebih detailnya, pada tabel 7.3. diperlihatkan distribusi rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan di setiap golongan pengeluaran lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan kecuali pada golongan pengeluaran 1 juta atau lebih, pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan lebih tinggi daripada pengeluaran untuk konsumsi makanan. Selain itu bila diperhatikan rincian-rincian di kelompok makanan terlihat pada golongan pengeluaran < Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,- - Rp 299.999,-, pengeluaran untuk padi-padian lebih tinggi daripada pengeluaran untuk rincian makanan lainnya, sedangkan pada golongan pengeluaran Rp 300.000,- ke atas pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi lebih tinggi daripada pengeluaran untuk konsumsi makanan lainnya.

Tabel 7.3

Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran
Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Jawa Barat Tahun 2011

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)								Rata-rata per Kapita	
	Kurang dari	100.000	150.000	200.000	300.000	500.000	750.000	1 juta +		
	100.000	149.999	199.999	299.999	499.999	749.999	999.999			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A. Makanan										
1. Padi-padian	45,10	30,98	23,99	18,13	12,21	8,19	5,67	2,63	8,02	
2. Umbi-umbian	0,47	0,74	0,64	0,51	0,44	0,38	0,34	0,22	0,35	
3. Ikan	5,89	4,31	4,24	4,07	3,78	3,57	3,34	2,04	3,12	
4. Daging	-	0,54	1,12	1,58	2,22	2,74	2,88	2,29	2,36	
5. Telur dan susu	2,72	2,00	2,40	2,84	3,11	3,39	3,65	2,78	3,09	
6. Sayur-sayuran	4,17	5,10	5,12	5,09	4,53	3,95	3,22	1,71	3,34	
7. Kacang-kacangan	2,34	2,14	2,39	2,33	2,04	1,62	1,28	0,68	1,42	
8. Buah-buahan	0,70	1,26	1,40	1,78	2,05	2,42	2,63	2,09	2,18	
9. Minyak dan lemak	3,58	3,04	2,63	2,60	2,16	1,77	1,48	0,79	1,57	
10. Bahan minuman	3,01	1,91	2,30	2,24	2,14	1,82	1,52	0,89	1,57	
11. Bumbu-bumbuan	1,24	1,43	1,38	1,48	1,38	1,22	1,02	0,57	1,03	
12. Konsumsi lainnya	1,59	1,65	1,97	1,84	1,76	1,54	1,24	0,71	1,30	
13. Makmin Jadi	7,01	7,79	10,37	13,09	15,19	16,06	16,46	12,85	14,45	
14. Tembakau & sirih	1,33	5,07	6,50	7,72	8,34	7,48	6,23	3,10	6,00	
Makanan	79,13	67,95	66,43	65,29	61,37	56,14	50,96	33,35	49,80	
1. Perumahan dll	14,57	18,01	17,89	18,35	19,53	20,91	21,69	22,25	20,89	
2. Barang dan jasa	6,11	11,45	11,87	12,28	13,69	15,66	18,20	24,28	18,15	
3. Pakaian, alas kaki dll	-	1,96	2,84	2,84	3,20	3,63	3,70	3,15	3,30	
4. Brg Tahan Lama	0,04	0,20	0,43	0,58	1,20	1,87	3,30	11,33	5,00	
5. Pajak dan asuransi	0,14	0,36	0,42	0,51	0,78	1,07	1,41	2,60	1,52	
6. Pesta & Upacara	-	0,07	0,11	0,15	0,23	0,71	0,74	3,05	1,35	
Bukan Makanan	20,87	32,05	33,57	34,71	38,63	43,86	49,04	66,65	50,20	

Sumber: Susenas 2011

Hal ini menandakan pola konsumsi makanan mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga dimana

seiring dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita konsumsi makanan dan minuman jadi juga semakin meningkat, bahkan mengalahkan konsumsi makanan pokok (padi-padian).

Untuk konsumsi bukan makanan, di setiap golongan rata-rata pengeluaran per kapita, persentase yang terbesar adalah pengeluaran untuk konsumsi perumahan dan fasilitas perumahan. Selanjutnya pengeluaran yang juga termasuk besar adalah pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2011 pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan lebih besar daripada konsumsi makanan. Tetapi bila di lihat lebih jauh lagi melalui golongan rata-rata pengeluaran per kapita maka hanya golongan rata-rata per kapita diatas satu juta yang pengeluaran untuk konsumsi bukan makanannya lebih besar daripada konsumsi makanan sedangkan golongan lainnya tidak. Sehingga, apabila ukuran kesejahteraan salah satunya adalah lebih besarnya persentase pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan daripada makanan maka di Jawa Barat pada tahun 2011 peningkatan kesejahteraan hanya pada golongan tertentu saja, belum mencapai seluruh masyarakat Jawa barat walaupun rata-rata pengeluaran per kapita mengalami peningkatan.

BAB 8

ASPEK SOSIAL EKONOMI LAINNYA

8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah sedemikian pesatnya. Berbagai jenis dan merk peralatan informasi dan komunikasi bermunculan di pasaran dengan berbagai fitur dan keunggulannya masing-masing. Masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, pelajar sampai dengan pengusaha mulai terbiasa dengan berbagai alat informasi dan komunikasi tersebut.

Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada bertujuan untuk memudahkan manusia dalam bekerja dan beraktifitas. Bayangkan, kalau dulu pengiriman data bisa memakan waktu berhari-hari namun sekarang bisa dalam hitungan detik melalui surat elektronik (email). Bila dulu untuk mengirim kabar harus melalui telepon atau surat pos, sekarang bisa melalui telepon genggam dengan menelepon langsung atau dengan SMS kapan saja dan dimana saja. Dengan adanya teknologi ini maka pekerjaan yang memakan waktu lama dapat dikerjakan dengan waktu yang jauh lebih singkat.

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh rumah tangga-rumah tangga di Jawa Barat.

Tabel 8.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan
Telepon Rumah dan *Hand Phone* (HP)
di Jawa Barat Tahun 2011

Klasifikasi Daerah	Telepon Rumah	HP
(1)	(2)	(3)
- Perkotaan	12,24	84,45
- Pedesaan	2,53	70,52
- Total	8,77	79,47

Sumber : Susenas 2011

Pada tahun 2011, persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah lebih kecil daripada HP, yaitu masing-masing sebesar 8,77 persen berbanding 79,47 persen. Lebih tingginya penguasaan HP daripada telepon rumah mungkin disebabkan karena HP lebih mudah penggunaannya, tidak perlu memasang jaringan telepon, dan harganya relatif murah di pasaran. Bila dibandingkan menurut tipe daerah penguasaan telepon rumah di perkotaan mencapai 12,24 persen, lebih tinggi daripada di pedesaan yang hanya 2,53 persen. Begitu pula dengan penguasaan HP, rumah tangga di perkotaan lebih banyak yang menguasai HP daripada di pedesaan. Yang menarik adalah lebih dari setengah rumah tangga di pedesaan telah memiliki HP yang berarti wabah teknologi informasi bukan hanya merambah perkotaan tetapi telah sampai di pedesaan.

Tabel 8.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Komputer
di Jawa Barat Tahun 2011

Tipe Daerah	PC/desktop	Notebook/Laptop
(1)	(2)	(3)
- Perkotaan	12,07	11,02
- Pedesaan	2,63	1,91
- Total	8,70	7,77

Sumber : Susenas 2011

Tabel selanjutnya menggambarkan persentase rumah tangga menurut penguasaan komputer, dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu PC/desktop dan Notebook/laptop. Secara umum, persentase penguasaan komputer oleh rumah tangga di Jawa Barat masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 8,70 persen rumah tangga yang menguasai PC/desktop dan 7,77 persen rumah tangga yang menguasai Notebook/laptop. Bila dirinci menurut tipe daerah, rumah tangga di perkotaan lebih tinggi persentasenya, baik dalam penguasaan PC/desktop atau Notebook/laptop, dibandingkan dengan pedesaan.

Selain penguasaan alat-alat informasi diatas, dalam susenas juga dikumpulkan data tentang akses internet yang dilakukan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas. Pada saat ini untuk mengakses internet bisa dilakukan dimana saja dan dengan media yang lebih beragam, bukan hanya menggunakan komputer tetapi juga bisa

menggunakan HP. Kemunculan media-media sosial seperti *Facebook* atau *twitter* di dunia maya membuat seseorang lebih sering mengakses internet. Tabel 8.3. berikut berisi tentang persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengakses internet selama 3 bulan yang lalu.

HP merupakan media yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet (57,43%). Selain mudah dibawa karena bentuknya yang mungil juga karena banyaknya paket-paket internet murah yang ditawarkan oleh provider telepon seluler sehingga dengan biaya yang sedikit sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya, media akses yang juga digunakan adalah warnet (42,28%). Tingginya persentase media warnet untuk mengakses internet mungkin salah satunya disebabkan oleh menjamurnya warnet-warnet yang menyediakan permainan game online. Selain itu warnet juga biasanya menetapkan tarif per jamnya tidak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Penggunaan HP di masa-masa mendatang mungkin saja akan semakin menenggelamkan pemakaian telepon rumah. Karena dengan menggunakan HP tidak perlu membayar tagihan telepon setiap bulannya dan pemakaian pulsa bisa lebih dikontrol. Selain itu kebutuhan internet juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses data dan informasi

**Tabel 8.3.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut
Penggunaan Internet di Jawa Barat Tahun 2011**

Lokasi/ Media Akses	Persentase
(1)	(4)
a. Rumah	26,21
b. Warnet	42,28
c. Kantor	17,29
d. Sekolah	13,08
e. HP	57,43
f. Lainnya	8,41

Sumber : Susenas 2011

8.2. Pelayanan Kesehatan, Beras Miskin dan Jaminan Sosial

Usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan . Dalam susenas 2011 terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program-program pengentasan kemiskinan, diantaranya tentang pelayanan kesehatan gratis dengan periode referensi selama 6 bulan yang lalu, pembagian raskin, jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Tabel 8.4.

**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis
Selama 6 Bulan Yang Lalu dan Jenis Kartu Yang Digunakan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011**

Tipe Daerah	Pernah Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis	Jenis Kartu/Surat Yang Digunakan				Total
		Jamkesmas	Kartu Sehat	Surat Miskin/SKT M	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	15,57	60,13	5,02	6,11	28,73	100,00
Pedesaan	17,86	66,72	8,16	8,51	16,61	100,00
Total	16,39	62,70	6,25	7,04	24,01	100,00

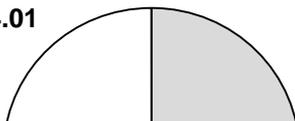
Sumber: Susenas 2011

Pada tabel 8.4 terlihat bahwa belum semua rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Tercatat hanya sekitar 16,39 persen rumah tangga di Jawa Barat yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Rumah tangga di pedesaan (17,86%) lebih banyak yang menikmati program ini dibandingkan rumah tangga di perkotaan (15,57%).

Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis paling banyak menggunakan Jamkesmas (62,70%), kartu/surat lainnya (24,01%), kartu sehat (6,25%) dan surat miskin/SKTM (7,04%). Rumah tangga, baik di pedesaan maupun di perkotaan, paling banyak menggunakan Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, yaitu masing-masing sebesar 60,13 persen dan 66,72 persen.

Gambar 7.1.
Persentase RT Menurut Penggunaan Kartu Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

24.01



□ Jamkesmas

■ Kartu Sehat

Program pemerintah yang ditujukan untuk rumah tangga miskin adalah pembagian beras miskin (raskin). Untuk Jawa Barat, terdapat sekitar 57,23 persen rumah tangga yang mendapat/membeli raskin selama 6 bulan terakhir dengan persentase tertinggi terdapat di pedesaan yaitu sebesar 73,34 persen rumah tangga, sedangkan di perkotaan hanya sekitar 48,27 persen rumah tangga.

Rumah tangga yang mendapat/membeli raskin tersebut rata-rata mendapat 5,48 kg per rumah tangga dengan rata-rata harga per kilogramnya sebesar Rp 2.347,-. Rumah tangga di perkotaan rata-rata mendapat raskin sebanyak 5,29 kg dengan harga Rp 2.378,- /kg sedangkan rumah tangga di pedesaan mendapat raskin sebanyak 5,71 kg dengan harga Rp 2.310,-/kg.

Tabel 8.5.

**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat/Membeli Raskin
Selama 3 Bulan Yang Lalu
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011**

Tipe Daerah	Pernah Mendapat/ Membeli Beras Miskin	Berapa Kg Raskin Pada Pembelian Terakhir	Berapa Rupiah per Kg Yang Dibayarkan pada Pembelian Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	48,27	5,29	2.378
Pedesaan	73,34	5,71	2.310
Total	57,23	5,48	2.347

Sumber : Susenas 2011

Selanjutnya, pada tabel 8.6 memperlihatkan ketersediaan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan bagi rumah tangga untuk keperluan pengobatan.

Pada tahun 2011, sekitar 18,70 persen rumah tangga di Jawa Barat menggunakan JPK MM/Kartu sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Jamkesmas dan bila dirinci menurut tipe daerah maka di perkotaan sebanyak 15,61 persen rumah tangga dan di pedesaan 24,25 persen. Persentase ini merupakan yang tertinggi diantara jenis jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan lainnya. Jenis Pembiayaan lainnya yang termasuk tinggi penggunaannya adalah JPK Jamsostek (10,76%) dan JPK PNS/Vetera/Pensiun (7,49%), sedangkan Dana Sehat/JPKM/JPK lain adalah jenis pembiayaan yang paling kecil penggunaannya, hanya sekitar 1,54 persen rumah tangga.

Tabel 8.6.

Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
JPK PNS/Veteran/Pensiun	9,61	3,66	7,49
JPK Jamsostek	15,01	2,97	10,76
Asuransi Kesehatan Swasta	3,97	0,66	2,79
Tunjangan/Penggantian biaya oleh perusahaan	4,67	0,79	3,29
JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu			
Miskin/Jamkesmas	15,61	24,25	18,70
Dana Sehat/JPKM/JPK Lain	1,60	1,43	1,54

Sumber : Susenas 2011

TABEL LAMPIRAN

<https://jabar.bps.go.id>



Tabel Lampiran 1.1.
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/ Kota	JENIS KELAMIN			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	2.496.599	2.361.013	4.857.612	105,74
2	Kab. Sukabumi	1.214.769	1.168.681	2.383.450	103,94
3	Kab. Cianjur	1.143.256	1.067.011	2.210.267	107,15
4	Kab. Bandung	1.649.367	1.586.248	3.235.615	103,98
5	Kab. Garut	1.239.633	1.207.654	2.447.287	102,65
6	Kab. Tasikmalaya	849.989	855.774	1.705.763	99,32
7	Kab. Ciamis	772.515	787.506	1.560.021	98,10
8	Kab. Kuningan	529.980	524.203	1.054.183	101,10
9	Kab. Cirebon	1.078.486	1.025.827	2.104.313	105,13
10	Kab. Majalengka	593.358	594.059	1.187.417	99,88
11	Kab. Sumedang	557.633	555.605	1.113.238	100,37
12	Kab. Indramayu	872.021	821.589	1.693.610	106,14
13	Kab. Subang	753.211	738.253	1.491.464	102,03
14	Kab. Purwakarta	443.912	423.916	867.828	104,72
15	Kab. Karawang	1.116.587	1.049.409	2.165.996	106,40
16	Kab. Bekasi	1.371.413	1.306.218	2.677.631	104,99
17	Kab. Bandung Barat	784.540	752.862	1.537.402	104,21
18	Kota Bogor	493.496	473.902	967.398	104,13
19	Kota Sukabumi	154.811	149.233	304.044	103,74
20	Kota Bandung	1.237.170	1.200.704	2.437.874	103,04
21	Kota Cirebon	151.268	150.443	301.711	100,55
22	Kota Bekasi	1.204.871	1.171.923	2.376.794	102,81
23	Kota Depok	896.631	873.156	1.769.787	102,69
24	Kota Cimahi	279.046	271.848	550.894	102,65
25	Kota Tasikmalaya	327.232	319.642	646.874	102,37
26	Kota Banjar	88.594	89.708	178.302	98,76
Jawa Barat		22.300.388	21.526.387	43.826.775	103,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 1.2.
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

No.	Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur			Jumlah	Dependency ratio
		0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Kab. Bogor	1.572.163	3.126.041	159.408	4.857.612	55,39
2	Kab. Sukabumi	753.327	1.518.772	111.351	2.383.450	56,93
3	Kab. Cianjur	698.923	1.417.891	93.453	2.210.267	55,88
4	Kab. Bandung	992.866	2.109.333	133.416	3.235.615	53,40
5	Kab. Garut	822.003	1.511.841	113.443	2.447.287	61,87
6	Kab. Tasikmalaya	514.570	1.099.721	91.472	1.705.763	55,11
7	Kab. Ciamis	430.787	1.021.732	107.502	1.560.021	52,68
8	Kab. Kuningan	301.775	681.605	70.803	1.054.183	54,66
9	Kab. Cirebon	616.757	1.389.284	98.272	2.104.313	51,47
10	Kab. Majalengka	331.203	780.381	75.833	1.187.417	52,16
11	Kab. Sumedang	302.297	734.767	76.174	1.113.238	51,51
12	Kab. Indramayu	465.548	1.150.790	77.272	1.693.610	47,17
13	Kab. Subang	410.208	997.287	83.969	1.491.464	49,55
14	Kab. Purwakarta	264.307	569.767	33.754	867.828	52,31
15	Kab. Karawang	619.991	1.458.474	87.531	2.165.996	48,51
16	Kab. Bekasi	809.174	1.800.461	67.996	2.677.631	48,72
17	Kab. Bandung Barat	475.433	991.272	70.697	1.537.402	55,09
18	Kota Bogor	275.619	648.680	43.099	967.398	49,13
19	Kota Sukabumi	87.962	198.779	17.303	304.044	52,96
20	Kota Bandung	623.650	1.700.937	113.287	2.437.874	43,33
21	Kota Cirebon	82.263	205.946	13.502	301.711	46,50
22	Kota Bekasi	648.816	1.676.117	51.861	2.376.794	41,80
23	Kota Depok	494.849	1.216.674	58.264	1.769.787	45,46
24	Kota Cimahi	147.714	379.746	23.434	550.894	45,07
25	Kota Tasikmalaya	190.645	421.129	35.100	646.874	53,60
26	Kota Banjar	50.022	115.246	13.034	178.302	54,71
	Jawa Barat	12.982.872	28.922.673	1.921.230	43.826.775	51,53

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 1.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Luas wilayah	Jumlah Penduduk	Perswntase Penduduk	Kepadatan (orang/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	2.997,13	4.857.612	11,08	1.621
2	Kab. Sukabumi	4.160,75	2.383.450	5,44	573
3	Kab. Cianjur	3.594,65	2.210.267	5,04	615
4	Kab. Bandung	1.756,65	3.235.615	7,38	1.842
5	Kab. Garut	3.094,40	2.447.287	5,58	791
6	Kab. Tasikmalaya	2.702,85	1.705.763	3,89	631
7	Kab. Ciamis	2.740,76	1.560.021	3,56	569
8	Kab. Kuningan	1.189,60	1.054.183	2,41	886
9	Kab. Cirebon	1.071,05	2.104.313	4,80	1.965
10	Kab. Majalengka	1.343,93	1.187.417	2,71	884
11	Kab. Sumedang	1.560,49	1.113.238	2,54	713
12	Kab. Indramayu	2.092,10	1.693.610	3,86	810
13	Kab. Subang	2.164,48	1.491.464	3,40	689
14	Kab. Purwakarta	989,89	867.828	1,98	877
15	Kab. Karawang	1.914,16	2.165.996	4,94	1.132
16	Kab. Bekasi	1.269,51	2.677.631	6,11	2.109
17	Kab. Bandung Barat	1.335,60	1.537.402	3,51	1.151
18	Kota Bogor	111,73	967.398	2,21	8.658
19	Kota Sukabumi	48,96	304.044	0,69	6.210
20	Kota Bandung	168,23	2.437.874	5,56	14.491
21	Kota Cirebon	40,16	301.711	0,69	7.513
22	Kota Bekasi	213,58	2.376.794	5,42	11.128
23	Kota Depok	199,44	1.769.787	4,04	8.874
24	Kota Cimahi	41,20	550.894	1,26	13.371
25	Kota Tasikmalaya	184,38	646.874	1,48	3.508
26	Kota Banjar	130,86	178.302	0,41	1.363
Jawa Barat		37.173,97	43.826.775	100,00	1.179

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

Tabel Lampiran 1.4
 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin
 dan Status Perkawinan

No	Kabupaten/ Kota	Laki - laki & Perempuan				Jumlah
		Status Perkawinan				
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bogor	34,92	59,10	1,68	4,30	100,00
2	Kab. Sukabumi	29,87	62,62	2,19	5,32	100,00
3	Kab. Cianjur	31,54	60,74	3,08	4,64	100,00
4	Kab. Bandung	32,08	61,03	2,31	4,58	100,00
5	Kab. Garut	32,43	61,00	1,70	4,87	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	27,76	64,45	1,89	5,90	100,00
7	Kab. Ciamis	25,36	66,43	2,58	5,63	100,00
8	Kab. Kuningan	28,80	63,66	1,81	5,73	100,00
9	Kab. Cirebon	34,14	58,59	1,83	5,44	100,00
10	Kab. Majalengka	28,37	63,63	2,51	5,49	100,00
11	Kab. Sumedang	26,96	65,14	2,56	5,34	100,00
12	Kab. Indramayu	30,01	60,93	3,15	5,91	100,00
13	Kab. Subang	26,10	64,28	3,12	6,50	100,00
14	Kab. Purwakarta	30,33	61,98	3,22	4,47	100,00
15	Kab. Karawang	30,43	62,51	2,17	4,89	100,00
16	Kab. Bekasi	32,18	61,02	1,84	4,96	100,00
17	Kab. Bandung Barat	30,83	62,63	2,25	4,29	100,00
18	Kota Bogor	36,40	56,27	2,29	5,04	100,00
19	Kota Sukabumi	35,96	54,12	3,51	6,41	100,00
20	Kota Bandung	37,90	54,57	2,38	5,15	100,00
21	Kota Cirebon	37,34	54,76	2,04	5,86	100,00
22	Kota Bekasi	37,10	57,16	1,48	4,26	100,00
23	Kota Depok	34,62	60,19	1,24	3,95	100,00
24	Kota Cimahi	34,97	57,59	3,14	4,30	100,00
25	Kota Tasikmalaya	34,05	58,78	2,11	5,06	100,00
26	Kota Banjar	29,44	61,74	2,28	6,54	100,00
Jawa Barat		32,12	60,71	2,18	4,99	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

Tabel Lampiran 1.5
Rata-rata Anggota Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumahtangga	Ang Run
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kab. Bogor	4.857.612	1.192.895	
2	Kab. Sukabumi	2.383.450	651.273	
3	Kab. Cianjur	2.210.267	599.349	
4	Kab. Bandung	3.235.615	842.877	
5	Kab. Garut	2.447.287	630.876	
6	Kab. Tasikmalaya	1.705.763	471.685	
7	Kab. Ciamis	1.560.021	472.483	
8	Kab. Kuningan	1.054.183	278.746	
9	Kab. Cirebon	2.104.313	569.964	
10	Kab. Majalengka	1.187.417	343.770	
11	Kab. Sumedang	1.113.238	318.885	
12	Kab. Indramayu	1.693.610	505.785	
13	Kab. Subang	1.491.464	432.183	
14	Kab. Purwakarta	867.828	221.143	
15	Kab. Karawang	2.165.996	579.745	
16	Kab. Bekasi	2.677.631	719.639	
17	Kab. Bandung Barat	1.537.402	429.647	
18	Kota Bogor	967.398	243.780	
19	Kota Sukabumi	304.044	78.476	
20	Kota Bandung	2.437.874	666.856	
21	Kota Cirebon	301.711	80.629	
22	Kota Bekasi	2.376.794	608.065	
23	Kota Depok	1.769.787	452.783	
24	Kota Cimahi	550.894	150.539	
25	Kota Tasikmalaya	646.874	168.873	
26	Kota Banjar	178.302	50.248	
Jawa Barat		43.826.775	11.761.192	

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

Tabel Lampiran 2.1
 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan pada Sebulan Terakhir
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

No	Kabupaten /Kota	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki & Perempuan
		%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bogor	41,79	41,53	41,67
2	Kab. Sukabumi	29,64	29,58	29,61
3	Kab. Cianjur	27,70	30,05	28,81
4	Kab. Bandung	27,62	29,91	28,74
5	Kab. Garut	29,36	27,55	28,44
6	Kab. Tasikmalaya	34,64	34,38	34,51
7	Kab. Ciamis	34,57	33,01	33,77
8	Kab. Kuningan	32,47	29,43	30,93
9	Kab. Cirebon	32,69	35,49	34,04
10	Kab. Majalengka	43,12	43,04	43,08
11	Kab. Sumedang	28,86	30,25	29,54
12	Kab. Indramayu	22,28	25,12	23,66
13	Kab. Subang	27,95	29,63	28,78
14	Kab. Purwakarta	38,10	40,53	39,26
15	Kab. Karawang	24,21	25,56	24,88
16	Kab. Bekasi	26,76	26,02	26,38
17	Kab. Bandung Barat	22,70	19,04	20,91
18	Kota Bogor	30,21	29,00	29,62
19	Kota Sukabumi	24,27	25,94	25,12
20	Kota Bandung	21,02	23,24	22,13
21	Kota Cirebon	36,60	35,28	35,94
22	Kota Bekasi	13,82	16,68	15,20
23	Kota Depok	21,96	24,64	23,29
24	Kota Cimahi	19,01	22,22	20,63
25	Kota Tasikmalaya	32,93	29,89	31,38
26	Kota Banjar	27,62	30,89	29,22
Jawa Barat		29,06	29,72	29,39

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

Tabel lampiran 2.2.

Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota,
Jenis Kelamin dan Tempat Berobat

No	Kabupaten/ Kota	Tempat Pelayanan Pengobatan				Praktek Nakes			
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter / Poliklinik	Puskesmas/ Pustu	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab. Bogor	2,12	2,00	2,57	23,87	26,80	8,88	1,05	0,27
2	Kab. Sukabumi	0,49	1,86	0,95	13,31	23,76	21,65	1,20	0,23
3	Kab. Cianjur	1,81	3,60	0,80	12,19	20,93	16,20	0,13	0,00
4	Kab. Bandung	1,10	4,12	1,80	25,21	24,22	9,35	0,64	0,00
5	Kab. Garut	0,29	2,26	0,66	14,20	23,61	18,89	0,53	0,07
6	Kab. Tasikmalaya	2,49	3,07	2,30	20,15	15,09	26,70	2,19	1,62
7	Kab. Ciamis	1,85	1,93	0,52	21,48	15,65	26,01	0,44	0,00
8	Kab. Kuningan	0,39	2,19	2,17	25,20	26,90	26,70	0,95	0,00
9	Kab. Cirebon	1,44	2,50	1,09	23,95	36,49	10,23	1,16	0,00
10	Kab. Majalengka	0,24	1,59	0,84	20,52	19,49	13,56	0,55	0,10
11	Kab. Sumedang	1,71	6,92	0,60	25,16	25,35	17,27	0,59	0,00
12	Kab. Indramayu	0,46	1,78	1,02	13,14	21,90	16,93	1,04	0,28
13	Kab. Subang	1,37	3,86	1,72	22,80	15,12	16,45	0,67	0,00
14	Kab. Purwakarta	3,11	5,96	5,81	28,46	22,04	20,54	4,61	2,62
15	Kab. Karawang	0,68	2,30	3,84	21,60	25,30	18,72	1,33	0,16
16	Kab. Bekasi	0,58	3,87	9,16	36,52	19,23	11,05	0,89	0,00
17	Kab. Bandung Barat	1,07	2,11	1,85	23,86	15,09	10,88	1,51	0,88
18	Kota Bogor	2,65	6,03	6,20	29,75	59,72	5,20	2,01	0,92
19	Kota Sukabumi	1,70	7,41	3,92	28,12	51,99	13,01	2,94	1,13
20	Kota Bandung	1,57	3,74	9,41	35,14	25,93	1,89	0,66	0,00
21	Kota Cirebon	1,48	4,81	3,64	19,55	52,46	0,76	0,68	0,43
22	Kota Bekasi	3,25	4,88	14,85	43,71	24,04	2,02	0,92	0,74
23	Kota Depok	0,35	4,70	7,96	26,58	19,96	8,63	0,97	0,00
24	Kota Cimahi	1,90	11,89	3,67	34,30	29,48	3,92	0,84	0,81
25	Kota Tasikmalaya	1,72	2,90	1,10	22,41	24,34	26,11	2,33	0,74
26	Kota Banjar	1,70	3,54	0,81	22,34	23,47	15,64	1,73	0,00
	Jawa Barat	1,37	3,15	3,06	23,21	24,30	14,24	1,07	0,31

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 2.3
 Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir

No	Kabupaten/ Kota	Penolong Kelahiran Terakhir						Jumlah
		Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili / Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Bogor	10,51	45,74	0,21	43,34	0,20	0,00	100,00
2	Kab. Sukabumi	6,61	56,54	0,60	35,98	0,27	0,00	100,00
3	Kab. Cianjur	7,72	31,62	1,02	59,04	0,24	0,36	100,00
4	Kab. Bandung	11,35	58,13	0,75	29,77	0,00	0,00	100,00
5	Kab. Garut	3,90	49,46	0,46	46,18	0,00	0,00	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	4,14	64,42	1,06	30,38	0,00	0,00	100,00
7	Kab. Ciamis	6,24	72,78	0,73	19,87	0,38	0,00	100,00
8	Kab. Kuningan	15,32	74,36	0,00	10,32	0,00	0,00	100,00
9	Kab. Cirebon	8,62	81,84	0,00	9,54	0,00	0,00	100,00
10	Kab. Majalengka	16,42	66,06	0,00	16,35	0,00	1,17	100,00
11	Kab. Sumedang	6,84	78,48	0,53	13,57	0,00	0,58	100,00
12	Kab. Indramayu	7,83	66,37	0,00	25,80	0,00	0,00	100,00
13	Kab. Subang	8,19	79,39	0,00	12,42	0,00	0,00	100,00
14	Kab. Purwakarta	10,43	54,56	0,45	34,02	0,00	0,54	100,00
15	Kab. Karawang	13,65	64,95	1,78	19,29	0,00	0,33	100,00
16	Kab. Bekasi	28,44	65,99	0,27	5,30	0,00	0,00	100,00
17	Kab. Bandung Barat	3,71	55,15	0,46	40,68	0,00	0,00	100,00
18	Kota Bogor	15,59	66,63	1,37	15,86	0,55	0,00	100,00
19	Kota Sukabumi	14,32	62,30	1,05	22,33	0,00	0,00	100,00
20	Kota Bandung	33,75	60,56	0,00	5,69	0,00	0,00	100,00
21	Kota Cirebon	30,57	64,57	0,74	4,12	0,00	0,00	100,00
22	Kota Bekasi	30,94	65,45	0,44	3,17	0,00	0,00	100,00
23	Kota Depok	28,73	67,14	0,30	3,83	0,00	0,00	100,00
24	Kota Cimahi	26,27	63,30	0,00	10,43	0,00	0,00	100,00
25	Kota Tasikmalaya	12,81	69,16	0,97	16,42	0,64	0,00	100,00
26	Kota Banjar	8,66	83,92	1,38	6,04	0,00	0,00	100,00
Jawa Barat		13,90	60,61	0,50	24,81	0,09	0,09	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

Tabel Lampiran 3.1
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis

No	Kabupaten / Kota	Dapat Membaca Menulis		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bogor	97,22	92,60	95,00
2	Kab. Sukabumi	98,48	96,66	97,59
3	Kab. Cianjur	98,60	97,04	97,85
4	Kab. Bandung	99,34	98,25	98,80
5	Kab. Garut	99,16	98,40	98,79
6	Kab. Tasikmalaya	99,25	98,57	98,91
7	Kab. Ciamis	99,12	96,91	98,01
8	Kab. Kuningan	98,64	96,04	97,34
9	Kab. Cirebon	94,58	89,01	91,85
10	Kab. Majalengka	97,47	93,66	95,59
11	Kab. Sumedang	97,91	96,97	97,44
12	Kab. Indramayu	92,64	78,85	86,03
13	Kab. Subang	95,42	89,27	92,33
14	Kab. Purwakarta	97,92	95,06	96,54
15	Kab. Karawang	95,61	90,79	93,30
16	Kab. Bekasi	96,85	92,63	94,77
17	Kab. Bandung Barat	99,22	98,85	99,04
18	Kota Bogor	99,04	97,16	98,10
19	Kota Sukabumi	98,94	98,22	98,58
20	Kota Bandung	99,38	98,81	99,10
21	Kota Cirebon	97,37	94,90	96,10
22	Kota Bekasi	99,13	97,31	98,23
23	Kota Depok	98,94	96,12	97,54
24	Kota Cimahi	99,74	99,70	99,72
25	Kota Tasikmalaya	99,73	99,36	99,55
26	Kota Banjar	97,97	96,44	97,21
Jawa Barat		97,84	94,88	96,38

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 3.2

Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki

No.	Kabupaten/Kota	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki									Jumlah
		Tidak Punya Ijazah SD	SD	SMP Umum/Kejuruan/MTs	SMA/MA	SMA Kejuruan	D1/D2	D3/Sarjana Muda	D4/S1	S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Bogor	26,22	34,29	18,17	10,76	6,53	0,52	1,23	2,15	0,12	100,00
2	Kab. Sukabumi	28,30	43,06	16,13	7,48	2,80	0,25	0,62	1,23	0,11	100,00
3	Kab. Cianjur	26,11	49,36	13,58	5,60	2,81	0,69	0,26	1,56	0,04	100,00
4	Kab. Bandung	16,72	34,49	23,39	15,93	4,01	0,92	1,54	2,91	0,08	100,00
5	Kab. Garut	22,72	45,43	18,26	9,40	1,79	0,37	0,32	1,71	0,00	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	17,41	52,80	16,91	7,74	2,03	0,47	0,66	1,78	0,20	100,00
7	Kab. Ciamis	16,03	48,56	18,76	9,68	2,93	0,68	0,76	2,48	0,12	100,00
8	Kab. Kuningan	16,56	50,06	17,20	8,18	4,17	0,63	0,62	2,27	0,31	100,00
9	Kab. Cirebon	28,41	39,20	17,90	9,74	2,72	0,28	0,61	1,11	0,04	100,00
10	Kab. Majalengka	19,95	45,37	18,62	8,96	3,07	0,28	0,91	2,70	0,13	100,00
11	Kab. Sumedang	15,02	45,85	22,27	9,30	4,37	0,34	0,87	1,87	0,10	100,00
12	Kab. Indramayu	28,43	37,17	20,99	7,95	2,83	0,28	0,49	1,87	0,00	100,00
13	Kab. Subang	23,82	39,75	19,15	10,13	4,10	0,34	0,57	1,94	0,21	100,00
14	Kab. Purwakarta	25,98	32,80	18,98	10,87	7,51	0,35	1,32	1,92	0,26	100,00
15	Kab. Karawang	25,61	34,06	19,15	12,13	6,28	0,23	1,07	1,39	0,09	100,00
16	Kab. Bekasi	16,80	25,38	18,97	23,08	10,65	0,39	1,70	3,00	0,03	100,00
17	Kab. Bandung Barat	17,21	44,53	19,38	13,74	2,02	0,52	0,55	1,86	0,18	100,00
18	Kota Bogor	16,14	26,37	18,61	20,69	7,66	0,87	2,66	6,12	0,88	100,00
19	Kota Sukabumi	17,77	32,33	18,37	16,59	8,79	0,59	1,79	3,12	0,65	100,00
20	Kota Bandung	8,68	25,01	19,60	26,01	6,64	1,01	3,52	8,93	0,60	100,00
21	Kota Cirebon	16,15	18,97	18,60	26,81	7,51	1,25	3,79	6,48	0,45	100,00
22	Kota Bekasi	9,44	19,40	20,23	25,54	9,27	0,85	5,15	9,55	0,56	100,00
23	Kota Depok	11,18	19,23	20,58	22,60	13,13	0,83	4,31	7,00	1,14	100,00
24	Kota Cimahi	8,53	21,54	24,09	24,46	7,83	1,75	4,26	6,95	0,57	100,00
25	Kota Tasikmalaya	15,12	44,52	17,57	12,09	5,77	0,61	1,44	2,79	0,09	100,00
26	Kota Banjar	18,14	38,85	20,05	11,88	5,57	0,50	1,47	3,35	0,18	100,00
Jawa Barat		19,80	36,47	18,95	13,83	5,34	0,57	1,54	3,26	0,23	100,00

Sumber : Susenas 2011

Tabel Lampiran 3.3
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Usia		
		7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	96,68	77,30	43,84
2	Kab. Sukabumi	96,58	78,59	42,59
3	Kab. Cianjur	96,37	85,30	40,96
4	Kab. Bandung	98,90	81,73	52,26
5	Kab. Garut	98,77	87,59	48,38
6	Kab. Tasikmalaya	98,60	82,16	63,89
7	Kab. Ciamis	97,41	90,11	64,13
8	Kab. Kuningan	96,97	83,64	52,98
9	Kab. Cirebon	97,95	86,41	41,79
10	Kab. Majalengka	98,15	88,56	67,66
11	Kab. Sumedang	97,74	84,08	61,65
12	Kab. Indramayu	95,90	85,51	50,79
13	Kab. Subang	97,98	82,32	47,49
14	Kab. Purwakarta	97,95	76,79	47,93
15	Kab. Karawang	98,09	83,97	40,98
16	Kab. Bekasi	98,71	89,22	41,42
17	Kab. Bandung Barat	96,58	72,79	32,46
18	Kota Bogor	97,60	88,81	60,50
19	Kota Sukabumi	99,09	90,30	49,66
20	Kota Bandung	98,67	90,66	65,28
21	Kota Cirebon	99,18	95,65	73,48
22	Kota Bekasi	99,50	96,71	75,10
23	Kota Depok	97,88	93,78	73,80
24	Kota Cimahi	100,00	91,23	69,24
25	Kota Tasikmalaya	97,78	88,48	61,94
26	Kota Banjar	97,83	92,99	62,54
Jawa Barat		97,78	84,97	51,83

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 3.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Usia		
		SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	97,53	81,37	44,03
2	Kab. Sukabumi	100,67	78,95	45,31
3	Kab. Cianjur	102,70	82,96	37,82
4	Kab. Bandung	100,04	89,78	54,74
5	Kab. Garut	104,44	85,57	55,52
6	Kab. Tasikmalaya	104,19	83,00	48,82
7	Kab. Ciamis	100,50	95,06	57,06
8	Kab. Kuningan	101,61	81,70	60,44
9	Kab. Cirebon	103,22	82,50	54,41
10	Kab. Majalengka	104,86	95,61	68,37
11	Kab. Sumedang	99,27	96,99	57,35
12	Kab. Indramayu	99,61	94,61	59,71
13	Kab. Subang	104,57	88,02	48,05
14	Kab. Purwakarta	98,28	80,20	53,33
15	Kab. Karawang	100,52	90,10	47,02
16	Kab. Bekasi	103,55	92,43	57,06
17	Kab. Bandung Barat	102,50	76,24	37,97
18	Kota Bogor	104,89	88,43	69,53
19	Kota Sukabumi	102,20	95,89	61,89
20	Kota Bandung	98,49	98,08	69,54
21	Kota Cirebon	103,69	89,60	85,63
22	Kota Bekasi	104,11	91,24	81,20
23	Kota Depok	98,04	100,41	76,79
24	Kota Cimahi	100,55	82,17	86,43
25	Kota Tasikmalaya	99,20	88,73	69,97
26	Kota Banjar	100,63	100,40	70,49
Jawa Barat		101,26	87,56	55,92

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 3.5
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Usia		
		SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	89,32	59,90	30,40
2	Kab. Sukabumi	94,17	65,65	30,58
3	Kab. Cianjur	94,91	71,32	34,20
4	Kab. Bandung	92,88	68,36	42,64
5	Kab. Garut	94,22	72,20	43,49
6	Kab. Tasikmalaya	97,45	71,78	41,69
7	Kab. Ciamis	94,51	77,38	45,77
8	Kab. Kuningan	92,93	70,34	46,26
9	Kab. Cirebon	91,11	64,10	40,18
10	Kab. Majalengka	94,52	78,60	46,70
11	Kab. Sumedang	90,61	73,23	52,38
12	Kab. Indramayu	90,43	74,37	48,55
13	Kab. Subang	91,28	69,05	41,01
14	Kab. Purwakarta	90,94	60,85	40,25
15	Kab. Karawang	91,18	71,48	35,34
16	Kab. Bekasi	91,52	72,31	42,52
17	Kab. Bandung Barat	95,02	65,12	30,15
18	Kota Bogor	91,40	69,11	47,11
19	Kota Sukabumi	92,26	81,45	50,96
20	Kota Bandung	89,16	72,76	52,80
21	Kota Cirebon	91,92	70,10	62,21
22	Kota Bekasi	92,28	75,77	60,64
23	Kota Depok	89,48	69,71	55,81
24	Kota Cimahi	93,90	68,60	58,99
25	Kota Tasikmalaya	93,97	75,87	49,87
26	Kota Banjar	92,89	80,44	54,78
Jawa Barat		92,26	69,57	42,50

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR 2011

Tabel Lampiran 4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	2010		2011	
		TPT	TPAK	TPT	TPAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	10,64	59,60	10,73	62,54
2	Kab. Sukabumi	9,89	59,02	9,47	62,05
3	Kab. Cianjur	11,21	62,90	10,15	62,65
4	Kab. Bandung	10,69	65,32	10,42	62,20
5	Kab. Garut	7,75	56,37	8,90	60,94
6	Kab. Tasikmalaya	7,79	69,40	8,29	61,18
7	Kab. Ciamis	5,12	67,45	8,86	61,66
8	Kab. Kuningan	7,87	60,55	9,01	61,96
9	Kab. Cirebon	12,97	58,68	10,18	61,73
10	Kab. Majalengka	5,82	66,96	7,80	61,48
11	Kab. Sumedang	7,90	65,17	8,04	61,18
12	Kab. Indramayu	11,29	63,22	10,11	63,09
13	Kab. Subang	8,72	62,91	9,10	62,24
14	Kab. Purwakarta	9,54	64,50	9,48	62,30
15	Kab. Karawang	14,88	62,07	10,06	62,81
16	Kab. Bekasi	9,03	66,85	10,27	64,12
17	Kab. Bandung Barat	13,31	55,97	9,38	62,04
18	Kota Bogor	17,20	65,56	10,31	61,92
19	Kota Sukabumi	15,65	58,50	10,10	61,42
20	Kota Bandung	12,17	60,73	10,34	61,40
21	Kota Cirebon	11,67	60,69	10,56	61,67
22	Kota Bekasi	12,11	62,18	10,51	63,79
23	Kota Depok	8,34	63,83	10,60	63,18
24	Kota Cimahi	13,59	63,05	10,32	62,19
25	Kota Tasikmalaya	8,16	63,18	9,14	61,15
26	Kota Banjar	5,87	56,68	7,18	59,97
Jawa Barat		10,33	62,38	9,83	62,27

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2011

Tabel Lampiran 5.1
Banyaknya Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Lantai Terluas

No.	Kabupaten/Kota	luas lantai Rumah per kapita < 8 m ²	Tanah/bambu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Bogor	19,60	4,80
2	Kab. Sukabumi	16,99	14,61
3	Kab. Cianjur	18,20	4,39
4	Kab. Bandung	21,51	1,79
5	Kab. Garut	23,07	4,36
6	Kab. Tasikmalaya	18,54	3,56
7	Kab. Ciamis	6,90	4,22
8	Kab. Kuningan	4,22	2,02
9	Kab. Cirebon	11,37	5,53
10	Kab. Majalengka	7,40	3,77
11	Kab. Sumedang	13,70	3,35
12	Kab. Indramayu	9,02	15,79
13	Kab. Subang	8,83	11,76
14	Kab. Purwakarta	9,93	7,92
15	Kab. Karawang	15,36	19,18
16	Kab. Bekasi	12,37	11,99
17	Kab. Bandung Barat	18,00	2,55
18	Kota Bogor	22,85	0,40
19	Kota Sukabumi	14,32	3,50
20	Kota Bandung	24,44	0,31
21	Kota Cirebon	13,54	0,35
22	Kota Bekasi	15,87	0,41
23	Kota Depok	14,68	0,32
24	Kota Cimahi	23,63	0,34
25	Kota Tasikmalaya	15,30	2,46
26	Kota Banjar	9,99	1,65
Jawa Barat		15,96	5,88

Sumber: Susenas 2011

Tabel Lampiran 5.2
 Persentase Banyaknya Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
 dan Sumber Air Minum

No.	Kabupaten/Kota	Air kemasan bermerk/Air isi ulang	Leding meteran/Eceran	Sumur bor/pompa	Sumur/Mata Air Terlindung	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	18,57	1,62	21,87	44,58	12,94	0,42
2	Kab. Sukabumi	8,80	2,82	10,86	39,00	36,69	1,84
3	Kab. Cianjur	7,80	4,02	8,35	58,53	18,85	2,45
4	Kab. Bandung	30,30	6,00	16,17	43,63	3,88	0,02
5	Kab. Garut	6,39	2,31	6,51	61,86	20,04	2,90
6	Kab. Tasikmalaya	5,32	1,44	12,06	43,39	35,52	2,28
7	Kab. Ciamis	7,99	4,33	14,90	62,49	10,28	0,00
8	Kab. Kuningan	5,59	7,33	32,37	49,02	5,63	0,07
9	Kab. Cirebon	26,92	12,44	25,73	31,49	3,43	0,00
10	Kab. Majalengka	18,30	4,84	18,79	43,00	14,59	0,46
11	Kab. Sumedang	6,10	9,26	5,20	70,97	8,46	0,00
12	Kab. Indramayu	38,21	23,36	29,55	7,40	0,33	1,15
13	Kab. Subang	7,90	15,93	42,85	26,96	6,09	0,26
14	Kab. Purwakarta	16,92	5,64	21,53	24,04	31,87	0,00
15	Kab. Karawang	31,32	5,96	47,84	11,23	3,34	0,31
16	Kab. Bekasi	65,44	2,87	26,84	3,22	1,63	0,00
17	Kab. Bandung Barat	6,77	5,11	8,01	70,41	9,35	0,35
18	Kota Bogor	21,24	32,35	24,27	20,78	1,36	0,00
19	Kota Sukabumi	29,48	9,97	32,70	25,49	2,36	0,00
20	Kota Bandung	53,56	23,26	16,09	5,99	0,64	0,45
21	Kota Cirebon	25,56	63,72	6,00	2,15	2,35	0,21
22	Kota Bekasi	68,69	4,04	26,16	1,00	0,11	0,00
23	Kota Depok	37,32	1,67	57,61	3,08	0,32	0,00
24	Kota Cimahi	48,19	12,12	26,20	12,14	1,20	0,15
25	Kota Tasikmalaya	20,93	9,10	26,30	37,10	6,34	0,23
26	Kota Banjar	26,40	6,29	3,93	55,96	7,19	0,23
	Jawa Barat	25,87	7,91	22,06	33,37	10,15	0,65

Sumber: Susenas 2011

Tabel Lampiran 5.3

Persentase Tangga Menurut Kabupaten/Kota Dan Bahan Bakar/Energi Utama yang Digunakan

No.	Kabupaten/Kota	Bahan bakar/energi utama untuk memasak						Jumlah
		Listrik	Gas/elpiji	Minyak tanah	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak memasak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Bogor	2,16	71,32	1,99	24,00	0,07	0,46	100,00
2	Kab. Sukabumi	0,53	45,83	1,03	52,09	0,00	0,52	100,00
3	Kab. Cianjur	0,37	42,72	0,79	55,56	0,00	0,55	100,00
4	Kab. Bandung	0,30	76,85	1,69	19,83	0,00	1,32	100,00
5	Kab. Garut	1,10	52,37	0,88	45,21	0,00	0,43	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	1,72	33,30	1,01	63,67	0,00	0,31	100,00
7	Kab. Ciamis	2,62	39,62	0,68	56,91	0,08	0,09	100,00
8	Kab. Kuningan	1,41	58,80	0,84	38,85	0,00	0,10	100,00
9	Kab. Cirebon	0,53	76,52	1,63	19,02	0,00	2,31	100,00
10	Kab. Majalengka	0,92	71,69	1,87	24,17	0,43	0,93	100,00
11	Kab. Sumedang	3,23	54,35	0,27	40,90	0,13	1,12	100,00
12	Kab. Indramayu	1,80	78,48	1,65	17,07	0,00	1,00	100,00
13	Kab. Subang	1,62	65,67	0,66	31,49	0,00	0,56	100,00
14	Kab. Purwakarta	1,85	58,74	1,40	36,32	0,25	1,44	100,00
15	Kab. Karawang	1,84	81,28	2,79	13,16	0,00	0,93	100,00
16	Kab. Bekasi	4,60	81,44	2,86	9,30	0,00	1,81	100,00
17	Kab. Bandung Barat	1,15	59,29	0,46	38,79	0,00	0,30	100,00
18	Kota Bogor	1,64	94,13	2,39	1,71	0,00	0,12	100,00
19	Kota Sukabumi	1,54	84,59	2,63	10,54	0,00	0,69	100,00
20	Kota Bandung	2,51	87,76	3,78	1,16	0,00	4,79	100,00
21	Kota Cirebon	1,76	85,18	4,14	6,06	0,00	2,86	100,00
22	Kota Bekasi	2,81	94,08	1,11	0,27	0,12	1,60	100,00
23	Kota Depok	0,32	94,18	2,62	1,22	0,00	1,66	100,00
24	Kota Cimahi	0,70	91,99	3,02	1,64	0,00	2,65	100,00
25	Kota Tasikmalaya	0,99	73,66	1,06	23,03	0,00	1,26	100,00
26	Kota Banjar	0,46	55,82	2,23	40,21	0,00	1,27	100,00
Jawa Barat		1,66	68,95	1,68	26,50	0,04	1,17	100,00

Sumber: Susenas 2011

Tabel Lampiran 6.1

Persentase Penduduk Jawa Barat Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2011

Kabupaten/Kota	golongan pengeluaran perkapita							
	< 100.000	100.000 - 149.999	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab Bogor	-	1,82	6,27	20,21	32,42	19,83	8,33	11,12
Kab Sukabumi	-	2,94	8,21	31,01	35,43	14,42	4,97	3,04
Kab Cianjur	0,24	5,14	14,36	34,40	32,02	9,08	2,50	2,25
Kab Bandung	0,34	0,88	4,52	20,03	35,60	19,52	9,63	9,49
Kab Garut	0,09	3,54	13,16	39,23	28,42	10,17	3,33	2,07
Kab Tasikmalaya	0,13	2,89	15,99	35,15	28,85	10,51	2,85	3,63
Kab Ciamis	-	0,20	3,86	22,47	40,40	21,58	6,33	5,16
Kab Kuningan	-	0,53	5,19	24,49	39,19	18,83	7,18	4,58
Kab Cirebon	-	0,49	3,63	28,13	42,52	16,36	5,47	3,40
Kab Majalengka	-	0,59	5,57	22,39	38,89	18,43	7,99	6,15
Kab Sumedang	-	1,74	5,17	21,70	35,29	21,59	7,11	7,39
Kab Indramayu	-	0,21	3,47	20,97	40,16	20,60	9,65	4,94
Kab Subang	-	-	3,68	20,88	41,60	22,70	6,41	4,73
Kab Purwakarta	-	0,45	3,34	15,84	34,51	25,63	9,97	10,26
Kab Karawang	-	-	2,34	15,28	33,99	27,17	11,81	9,41
Kab Bekasi	-	0,11	0,84	8,02	29,05	26,30	15,85	19,83
Kab Bandung Barat	0,21	3,29	13,14	32,50	35,85	9,53	3,89	1,58
Kota Bogor	-	-	0,22	10,08	33,35	25,48	12,18	18,69
Kota Sukabumi	-	-	3,46	15,47	33,37	22,91	10,90	13,90
Kota Bandung	-	0,20	0,81	7,46	20,58	21,81	13,48	35,65
Kota Cirebon	-	0,53	1,76	13,15	29,79	24,82	12,05	17,89
Kota Bekasi	-	-	-	3,05	21,86	27,77	20,49	26,83
Kota Depok	-	-	0,57	2,12	18,95	26,35	19,45	32,56
Kota Cimahi	-	-	0,93	8,55	24,69	24,13	17,56	24,13
Kota Tasikmalaya	-	1,92	4,46	25,88	33,52	17,76	5,97	10,50
Kota Banjar	-	0,42	5,29	24,95	37,59	16,40	7,23	8,11
Jawa Barat	0,06	1,28	5,44	20,49	32,43	19,58	9,27	11,44

Sumber: SUSENAS 2011

Tabel Lampiran 6.2
 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran
 Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Jawa Barat Tahun 2011

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)								Rata-rata per Kapita
	Kurang dari 100.000	100.000	150.000	200.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000 dan Lebih	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Makanan									
1. Padi-padian	45,10	30,98	23,99	18,13	12,21	8,19	5,67	2,63	8,02
2. Umbi-umbian	0,47	0,74	0,64	0,51	0,44	0,38	0,34	0,22	0,35
3. Ikan	5,89	4,31	4,24	4,07	3,78	3,57	3,34	2,04	3,12
4. Daging	-	0,54	1,12	1,58	2,22	2,74	2,88	2,29	2,36
5. Telur dan susu	2,72	2,00	2,40	2,84	3,11	3,39	3,65	2,78	3,09
6. Sayur-sayuran	4,17	5,10	5,12	5,09	4,53	3,95	3,22	1,71	3,34
7. Kacang-kacangan	2,34	2,14	2,39	2,33	2,04	1,62	1,28	0,68	1,42
8. Buah-buahan	0,70	1,26	1,40	1,78	2,05	2,42	2,63	2,09	2,18
9. Minyak dan lemak	3,58	3,04	2,63	2,60	2,16	1,77	1,48	0,79	1,57
10. Bahan minuman	3,01	1,91	2,30	2,24	2,14	1,82	1,52	0,89	1,57
11. Bumbu-bumbuan	1,24	1,43	1,38	1,48	1,38	1,22	1,02	0,57	1,03
12. Konsumsi lainnya	1,59	1,65	1,97	1,84	1,76	1,54	1,24	0,71	1,30
13. Makanan dan minuman jadi	7,01	7,79	10,37	13,09	15,19	16,06	16,46	12,85	14,45
14. Tembakau dan sirih	1,33	5,07	6,50	7,72	8,34	7,48	6,23	3,10	6,00
Konsumsi Makanan	79,13	67,95	66,43	65,29	61,37	56,14	50,96	33,35	49,80
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	14,57	18,01	17,89	18,35	19,53	20,91	21,69	22,25	20,89
2. Barang dan jasa	6,11	11,45	11,87	12,28	13,69	15,66	18,20	24,28	18,15
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	-	1,96	2,84	2,84	3,20	3,63	3,70	3,15	3,30
4. Barang-barang yang tahan lama	0,04	0,20	0,43	0,58	1,20	1,87	3,30	11,33	5,00
5. Pajak dan asuransi	0,14	0,36	0,42	0,51	0,78	1,07	1,41	2,60	1,52
6. Keperluan pesta dan upacara	-	0,07	0,11	0,15	0,23	0,71	0,74	3,05	1,35
Jumlah Bukan Makanan	20,87	32,05	33,57	34,71	38,63	43,86	49,04	66,65	50,20
Rata Konsumsi per Kapita sebulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SUSENAS 2011

Tabel Lampiran 7.1
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
Melakukan Perjalanan Wisata dan Akses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir

No	Kabupaten/Kota	Melakukan Perjalanan Wisata	Apakah Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Bogor	14,71	14,02
2	Kab. Sukabumi	10,17	7,55
3	Kab. Cianjur	9,61	7,58
4	Kab. Bandung	13,02	15,81
5	Kab. Garut	11,36	7,26
6	Kab. Tasikmalaya	11,05	7,86
7	Kab. Ciamis	12,73	7,93
8	Kab. Kuningan	12,31	12,54
9	Kab. Cirebon	8,35	6,99
10	Kab. Majalengka	16,33	11,37
11	Kab. Sumedang	9,94	9,73
12	Kab. Indramayu	10,88	10,91
13	Kab. Subang	8,61	10,06
14	Kab. Purwakarta	15,07	13,97
15	Kab. Karawang	12,21	8,61
16	Kab. Bekasi	18,21	17,87
17	Kab. Bandung Barat	5,55	7,56
18	Kota Bogor	14,17	27,65
19	Kota Sukabumi	13,03	19,59
20	Kota Bandung	25,96	33,56
21	Kota Cirebon	16,82	30,35
22	Kota Bekasi	18,90	33,56
23	Kota Depok	14,87	30,94
24	Kota Cimahi	20,51	30,06
25	Kota Tasikmalaya	11,24	14,84
26	Kota Banjar	15,44	12,32
Jawa Barat		13,53	15,11

Sumber: Susenas 2011

Tabel Lampiran 7.2
 Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota
 dan Pembelian Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Terakhir

No	Kabupaten/Kota	Persentase RT Yang Pernah Membeli Beras Murah/Raskin	Berapa Kg Beras Raskin Yg Terakhir Dibeli?
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Bogor	58,65	4,74
2	Kab. Sukabumi	64,52	6,88
3	Kab. Cianjur	73,78	5,89
4	Kab. Bandung	60,94	4,94
5	Kab. Garut	78,03	5,52
6	Kab. Tasikmalaya	67,17	7,07
7	Kab. Ciamis	56,64	5,56
8	Kab. Kuningan	58,22	8,94
9	Kab. Cirebon	90,30	3,95
10	Kab. Majalengka	72,99	4,39
11	Kab. Sumedang	60,14	5,01
12	Kab. Indramayu	83,84	5,35
13	Kab. Subang	72,27	4,96
14	Kab. Purwakarta	54,92	7,10
15	Kab. Karawang	62,16	4,78
16	Kab. Bekasi	34,47	6,26
17	Kab. Bandung Barat	66,89	6,44
18	Kota Bogor	46,10	5,82
19	Kota Sukabumi	41,34	6,43
20	Kota Bandung	27,98	4,39
21	Kota Cirebon	43,75	4,64
22	Kota Bekasi	14,21	6,69
23	Kota Depok	16,30	6,42
24	Kota Cimahi	29,08	5,92
25	Kota Tasikmalaya	64,06	4,40
26	Kota Banjar	51,40	4,83
Jawa Barat		57,23	5,48

Sumber: Susenas 2011

Tabel 7.3
Persentase Rumah tangga Yang Memiliki Akses Teknologi dan Informasi

No	Kabupaten/Kota	Telepon Rumah	Telepon Seluler	Desktop/PC	Laptop/Notebook
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	5,86	79,19	7,89	6,38
2	Kab. Sukabumi	3,65	71,47	3,21	2,18
3	Kab. Cianjur	5,46	68,84	3,39	2,85
4	Kab. Bandung	8,99	78,39	9,98	6,63
5	Kab. Garut	3,56	70,37	3,73	3,22
6	Kab. Tasikmalaya	3,18	70,74	3,45	3,73
7	Kab. Ciamis	4,25	74,68	4,18	4,24
8	Kab. Kuningan	5,72	79,12	6,04	6,27
9	Kab. Cirebon	3,96	70,50	3,17	2,78
10	Kab. Majalengka	5,56	74,33	6,48	2,96
11	Kab. Sumedang	3,18	76,00	4,21	4,36
12	Kab. Indramayu	4,74	76,33	3,71	3,06
13	Kab. Subang	3,99	72,77	4,05	2,25
14	Kab. Purwakarta	4,56	81,61	7,22	5,54
15	Kab. Karawang	3,33	79,91	4,29	4,47
16	Kab. Bekasi	5,72	89,10	9,32	6,96
17	Kab. Bandung Barat	4,44	71,51	3,35	4,68
18	Kota Bogor	18,83	88,99	14,70	16,11
19	Kota Sukabumi	16,18	84,50	11,09	10,10
20	Kota Bandung	28,60	93,94	24,45	23,40
21	Kota Cirebon	21,79	88,42	16,53	18,00
22	Kota Bekasi	28,17	96,84	23,13	24,76
23	Kota Depok	18,41	95,77	22,43	18,86
24	Kota Cimahi	19,47	92,38	24,30	20,12
25	Kota Tasikmalaya	11,33	81,52	7,32	7,54
26	Kota Banjar	5,96	79,39	5,07	8,58
Jawa Barat		8,77	79,47	8,70	7,77

Sumber: Susenas 2011

DATA

**MENCERDASKAN
BANGSA**



Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat
Jl. PH. Hasan Mustafa No. 43 Telp. (022) 7272595 - 7201696
Fax. 7213572 Bandung 40124 E-mail: bps3200@bps.go.id
Home Page [http: www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)